

**PERSILANGAN**

# Medayu Bugis

TELAAH DINAMIKA SOSIAL POLITIK  
KERAJAAN JOHOR-PAHANG-RIAU-LINGGA

SAEPUDDIN, M.Ag

PERSILANGAN MELAYU BUGIS:  
TELAAH DINAMIKA SOSIAL POLITIK  
KERAJAAN JOHOR-PAHANG-RIAU-  
LINGGA

**Saepuddin, M.Ag**



**PERSILANGAN MELAYU BUGIS:  
TELAAH DINAMIKA SOSIAL POLITIK KERAJAAN JOHOR-  
PAHANG-RIAU-LINGGA**

All rights reserved  
@ 2019, Indonesia: Bintan

**Saepuddin, M.Ag**

**ISBN: 978-623-91002-6-1**

**Editor:**  
Saepuddin, M,Ag  
Doni Septian, S.Sos.,M.IP

**Penyunting:**  
P3M STAIN KEPRI

**Lay Out dan Design Cover:**  
Eko Riady, SH

**Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS**  
**Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan**

**Cetakan Pertama, Desember 2019**

**Saepuddin, M.Ag**

VII + 127 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Kata Pengantar Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**

Sejarah merupakan pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk menentukan sikap di masa kini dan merancang masa depan yang lebih baik. Karena itu belajar sejarah sangat penting, dan lebih penting lagi adalah belajar dari sejarah. Kita patut bersyukur kepada Allah karena nenek moyang kita yang hidup di Kepulauan Nusantara memiliki sejarah panjang yang gemilang, terlebih lagi setelah bersentuhan dengan Islam.

Buku yang ditulis oleh saudara Saepuddin, M.Ag ini memaparkan Persilangan Melayu Bugis: Telaah Dinamika Sosial Politik Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Dalam buku ini, kajian sejarah tidak hanya membahas perkembangan politik tetapi juga sosial budaya yang berkembang di masa kegemilangan kerajaan Islam di Kepulauan Riau yang menjadi Bunda Tanah Melayu. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam penguatan visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yaitu: Unggul, Keislaman dan Kemelayuan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberi dukungan dan kerjasamanya atas lahirnya buku ini. Ucapan terima kasih juga di sampaikan kepada semua pihak yang membantu atas kelancaran penelitian dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Amin.

Bintan,     Desember 2019  
Ketua,

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

## PENGANTAR PENULIS

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengupas tentang Persilangan Melayu Bugis: Telaah Dinamika Sosial Politik Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga.

Sebenarnya sudah banyak buku sejarah Melayu yang beredar. Namun buku yang khusus mengupas kajian sejarah sosial kerajaan Islam Melayu masih langka. Kebanyakan pembahasannya terkait bidang bahasa, kebudayaan, serta historisitas secara umum. Oleh sebab itu, menurut saya, akan lebih baik jika dilakukan kajian dengan pendekatan sosial yang lebih banyak untuk sejarah di Kepulauan Riau dan Nusantara. Pendekatan sosial dengan beragam teori sosial sebagai ilmu bantunya diyakini akan mampu memberikan kontribusi positif dalam penulisan historiografi Melayu dan Nusantara.

Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa perkembangan suatu negara tergantung dengan dinamika politik yang terjadi. Sedangkan dinamika politik tersebut terjadi karena ada dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terkadang dapat memberikan dampak besar terhadap sejarah perjalanan negara.

Fenomena ini juga dialami oleh kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga pada kurun waktu 1699-1913 M. Kerajaan yang merupakan lanjutan dari kerajaan Sriwijaya ini juga telah mengalami pasang surut dinamika sosial politik sejak kerajaan itu berdiri. Salah satu titik kisar dalam perubahan politik itu ialah masuknya kalangan bangsawan Bugis dalam struktur pemerintahan pada 1699.

Peristiwa sejarah tersebut telah memberikan dampak terhadap dinamika perubahan sosial politik yang terjadi di kerajaan Johor-Pahang-Riau dan menjadi cikal-bakal dari sistem baru pemerintahan. Konflik pe-

rebutan kekuasaan, mampu menyatukan dua suku bangsa yang berbeda untuk mengambil alih kekuasaan dan membagi-baginya sesuai kesepakatan. Sejak saat itu, secara turun temurun keturunan dari bangsawan Bugis tersebut menjadi bagian penting dalam dinamika poli-tik, khususnya era kolonialisme bangsa Eropa ke nusantara. Sehingga, dikotomi antara Bugis dan Melayu pun mulai hilang dan masyarakat bisa hidup berbaur satu sama lain tanpa memandang kesukuan yang menjerumus pada primordialisme. Darah mereka juga tidak lagi murni Melayu dan juga Bugis. Namun, penanda bahwa secara patriarki mereka bernasab pada orang tua yang Melayu dan Bugis itu ditandai nama atau gelaran di depan nama, seperti “Tengku” dan “Engku” untuk keturunan Melayu dan “Raja” untuk keturunan Bugis. Gelar Raja itu juga sesuatu yang baru hadir setelah kedatangan Bugis.

Dengan demikian, maka para perantau di tanah Melayu yang hadir di era kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga sudah menjadi Melayu seutuhnya. Walaupun kini mereka bisa menemukan nasab hingga ke bangsawan Bugis dari Opu Daeng yang Lima, namun mereka telah tumbuh dan hidup dalam tradisi dan adat istiadat Melayu. Demikian juga dengan etnis-etnis lain, mereka yang datang ketika era kerajaan dan masih memiliki turun temurun hingga saat ini, mereka telah menjadi bagian Melayu. Konteks pemahaman yang demikian ini, akan menghilangkan gap primordialisme dan sukuisme di setiap daerah. Multietnis yang ada di daerah justru harus dimaknai sebagai keberagaman yang perlu dirawat. Begitu juga multikulturalisme yang ada di daerah juga harus dijaga dan dirawat bersama agar keragaman tersebut menjadi potensi dan energy positif dalam melahirkan masyarakat Madani yang maju, makmur, aman dan damai.

Pengalaman Indonesia modern ini perlu kiranya untuk mengambil contoh dari pengalaman yang pernah terjadi di Riau-Lingga. Situasi politik di setiap daerah di Indonesia saat ini sering kali mengusung isu-isu primordialisme, kesukuan dan agama yang sering kali dalam bentuk bahasa “putera daerah”. Dalam hal primordialisme dan kesukuan, bahkan ada upaya kuat untuk kait-mengaitkan nasab keturunan dengan keabsahan nasab untuk disebut sebagai putera daerah. Liberalisasi politik di Indonesia justru mengantarkan pembangkitan kembali isu-isu primordialisme dan agama sebagai isu seksi. Terjadinya kekerasan selama pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah seringkali karena kuatnya isu primordialisme yang sudah di sekat-sekat sedemikian rupa untuk membangun penyempinan makna kesukuan dan kedaerahan. Dalam politik saat ini juga terjadi pergolakan, misalnya calon kepala daerah antara pulau A dan pulau B, menjadi pertengkaran karena penyempinan itu daerah yang di lakukan masing-masing tim dalam membangun fanatisme pendukungnya. Akibatnya, dinamika sosial menjadi tidak seimbang karena sistem tercemar oleh penguatan isu yang memecah belah.

Pada akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi amal jariah. Amin.

Bintan, 10 Desember 2019

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SAMBUTAN KETUA STAIN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II MENGENAL KERAJAAN JOHOR-PAHANG- RIAU-LINGGA .....	19
A. Berebut Kuasa di Selat Malaka .....	20
B. Bunda tanah Melayu Tetap Dikenang .....	30
BAB III DIASPORA BUGIS DI TANAH MELAYU .....	39
A. Pelaut Penakluk Samudera .....	39
B. Lima Opu, Saudagar Yang Bangsawan.....	49
C. Sumpah Setia: Menjadi Melayu .....	61
BAB III PENGARUH STRUKTUR FUNGSIONAL SETE- LAH KEHADIRAN BUGIS.....	71
A. Sumpah Setia: Menjadi Melayu .....	72
B. Perkawinan Sosial Budaya.....	87
C. Integritas Melayu: Relevansi Dari Pengalaman Riau Lingga..	96
BAB V PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	111
GLOSARIUM.....	114
DAFTAR INDEKS .....	124





## BAB I

### PENDAHULUAN

Pekembangan suatu negara tergantung dengan dinamika politik yang terjadi. Sedangkan dinamika politik tersebut terjadi karena ada dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terkadang dapat memberikan dampak besar terhadap sejarah perjalanan negara. Menurut Ramlah Surbakti, penyebab utama terjadinya perubahan politik ada dua, yakni adanya konflik kepentingan dan adanya nilai-nilai baru yang hendak di adopsi.<sup>1</sup> Ada juga perubahan yang disebabkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah yang berkuasa. Dari dua faktor tersebut, kerap kali konflik kepentingan menjadi penyebab utama dalam perubahan politik suatu negara atau pemerintahan.

Begitu juga yang dialami oleh kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga pada kurun waktu 1699-1913 M. Kerajaan yang merupakan lanjutan dari kerajaan Sriwijaya ini juga telah mengalami pasang surut dinamika sosial politik sejak kerajaan itu berdiri. Salah satu titik kisar dalam perubahan politik itu ialah masuknya kalangan bangsawan Bugis dalam struktur pemerintahan

---

<sup>1</sup>Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1993). Hlm. 246-246

pada 1699. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam sistem tata pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau. Sebagai kalangan pendatang, bangsawan Bugis menjadi tumpuan bagi berbagai kepentingan politik dan ekonomi kerajaan karena jumlah mereka terbilang banyak sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi legitimasi kerajaan.

Dinamika perubahan yang terjadi setelah kehadiran bangsawan Bugis pada struktur jabatan pemerintahan dan perubahan sosial menjadi layak untuk dikaji karena kedudukan suku Bugis menjadi sejajar dengan suku Melayu. Mereka hidup dengan adanya ikatan tersebut dan diperkuat lagi dengan kesamaan agama serta melalui perkawinan silang antara dua suku tersebut. Sehingga, dikotomi antara Bugis dan Melayu pun mulai hilang dan masyarakat bisa hidup berbaur satu sama lain tanpa memandang kesukuan yang menjerumus pada primordialisme.

Gambaran di atas menjadi landasan untuk dikaji lebih lanjut sebab beberapa pertimbangan. *Pertama*, kajian sejarah sosial kerajaan Islam Melayu ini belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Kebanyakan kajian yang ada lebih banyak pada bidang bahasa, kebuda-

yaan, serta historisitas secara umum. *Kedua*, dua suku bangsa, Melayu dan Bugis, yang melebur menjadi satu kekuatan politik kerajaan telah menunjukkan adanya suatu proses asimilasi demi mengarah pada perubahan yang lebih baik walaupun mereka dipertemukan karena konflik perebutan kekuasaan. *Ketiga*, kajian terhadap sejarah sosial lokal menjadi bagian penting—sejak diberlakukan otonomi daerah—guna mengetahui sejarah. *Keempat*, dengan kajian ini akan melengkapi kajian-kajian sejarah, khususnya sejarah sosial, dari kajian di bidang keilmuan lainnya.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab kehadiran bangsa Bugis di tanah Melayu hingga masuk dalam struktur di kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga, serta untuk mengetahui dan mendalami dampak perubahan yang terjadi akibat pengaruh kehadiran bangsawan Bugis terhadap dinamika sosial politik di kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga.

Kajian ini merupakan hasil kajian sejarah dengan pendekatan sosial. Di kalangan sejarawan<sup>2</sup>, sejarah sosial diartikan sebagai penulisan sejarah yang menem-

---

<sup>2</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hal. 42.

patkan masyarakat sebagai bahan kajian. Kajian sejarah yang dimaksud di sini ialah kajian dari sebuah peristiwa masa lalu yang akan digali guna menjadi pelajaran bagi masa kini. Dalam ilmu sejarah, peristiwa masa kini merupakan pengulangan dari peristiwa masa lalu sebagai bagian dari dinamika kemajuan. Sedangkan pendekatan sosial, yakni kajian ini lebih menitikberatkan pada peristiwa sosial yang akan digali dan dianalisa menggunakan teori sosiologi.

Sudah banyak penulis yang mengupas perihal sejarah kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga dari berbagai tinjauannya dan lebih banyak lagi yang mengkaji perihal bahasa dan sastranya. Apalagi telah jamak diketahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu Riau dengan sang pelopornya Raja Ali Haji. Akan tetapi, dibandingkan dengan kajian sejarah perihal kerajaan di Jawa, kajian tentang kerajaan Johor -Pahang-Riau-Lingga masih sangat sedikit.

Berikut penulis akan memaparkan beberapa kajian yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa penulis lain, khususnya di bidang sejarah sosial dan sejarah politik. Kajian terkini perihal sejarah kerajaan ini dikupas dalam buku *Sejarah Kesultanan Riau Lingga*

*dalam Perspektif Hukum dan Adat* dengan editor Erwiza Erman. Buku yang diterbitkan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama Republik Indonesia ini terbit pada 2012. Buku ini mengupas perihal sejarah pembentukan kerajaan Riau Lingga, sistem hukum yang digunakan, adat-istiadat dan kebudayaan pada kerajaan tersebut.

Karya Ahmad Dahlan (2014), *Sejarah Melayu*, merupakan hasil dari disertasinya merupakan karya modern tentang sejarah melayu. Fokus kajiannya lebih banyak pada bagian politiknya sehingga sejarah dinamika sosial kurang mendapatkan porsi sebanding.

Kajian yang dituliskan oleh Achmad Syahid membahas lebih jauh perihal pemikiran politik Raja Ali Haji. Achmad Syahid menilai bahwa simbol agama bagian penting bagi untuk menunjukkan kedaulatan dan kewibawaan raja dan kerajaannya. Oleh Karena itu, kerajaan tidak hanya bersandar pada indikator-indikator fisik seperti luas wilayah kekuasaan, struktur kekuasaan dan lingkup pengaruh, kekuatan armada perang, kemakmuran rakyat, perangkat organisasi, dan kemegahan istana belaka. Telaah terhadap pemikiran politik Islam Melayu juga telah dilakukan oleh Faisal Shadik dalam

tesis yang dibuat pada 2007 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Menurutnya, pemerintahan ideal dalam pandangan Raja Ali Haji itu terlampau sulit diterapkan karena kekuasaan kerap kali menimbulkan konflik. Apa yang terjadi pada kerajaan Riau Lingga juga belum termasuk memenuhi keteriteria pemimpin yang diidealkan oleh Raja Ali Haji. Penelitian dua penulis ini menitikberatkan pada dua karya Raja Ali Haji, yaitu *Muqaddimah fi Intizam dan Samarat al-Muhimmah*. Walaupun mengulas perihal dinamika sosial dan sejarah politik yang terjadi di Melayu, namun fokus kajian tersebut lebih pada kajian pemikiran dengan menjadikan latar sosial politik sebagai latar belakang untuk mencapai tujuan penelitian.

Kajian tentang dinamika sosial politik pada kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga ini masih sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan kajian perihal bahasa dan kebudayaan serta sejarah secara umum. Padahal, sejarah dinamika sosial kerajaan juga layak untuk menjadi telaah mendalam guna mempelajari lebih jauh dinamika sosial yang terjadi terhadap keberlangsungan sistem politik dan pemerintahan kerajaan. Oleh sebab itu, kajian perihal pengaruh politik ini masih terjadi

kekosongan sehingga layak untuk ditelaah lebih mendalam.

Kajian ini merupakan kajian sejarah dengan pendekatan sosial dan politik. Sejarah sosial diartikan sebagai penulisan sejarah yang menempatkan masyarakat sebagai bahan kajian.<sup>3</sup> Kajian sejarah yang dimaksud di sini ialah kajian dari sebuah peristiwa masa lalu yang digali guna menjadi pelajaran bagi masa kini. Sedangkan pendekatan sosial, yakni kajian ini lebih menitikberatkan pada peristiwa sosial yang digali dan dianalisa menggunakan teori sosiologi.

Kekhasan dari kajian sejarah sosial sangat adaptif dan akomodatif terhadap teori-teori lain di luar ilmu sejarah, terutama dalam penerimaannya terhadap teori-teori sosiologi dan antropologi. Di kalangan sejarawan sosial berpendapat bahwa ada relasi timbal balik dan saling menguntungkan di antara sosiologi, antropologi dan sejarah. Berkat integrasi itu, kalangan sejarawan sosial menilai bahwa sejarah berhutang budi kepada ilmu-ilmu sosial yang menjadi cikal-bakal sejarah sosial. Maka dari itu, sejarah sosial tidak lepas dari penggunaan ilmu-ilmu sosial.

---

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hal. 42.



Dalam kajian ini, teori sosial yang menjadi pisau analisa ialah teori struktur fungsional yang dipopulerkan oleh Talcott Persons. Dalam perspektif teori fungsionalisme, aktor (dalam hal ini adalah penguasa) berfungsi untuk menjaga “kesimbangan” sistem agar bisa berjalan secara kesinambungan. Hubungan penguasa dengan rakyat merupakan sebuah pola yang harus terjalin secara berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan. Keduanya merupakan bagian dalam sistem politik yang saling menguatkan satu sama lain. Penguasa yang tidak bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman kepada rakyatnya akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Begitu juga rakyat merasa hak-haknya telah terlindungi dengan baik oleh penguasa, akan memberikan dukungan untuk meralisasikan tujuan utama dari bernegara. Oleh sebab itu, seorang penguasa merupakan aktor yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi berdasarkan pada norma-norma dan nilai yang telah berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Penguasa memiliki fungsi penting untuk mengejawantahkan kekuasaannya dalam menciptakan sistem politik yang diidamkan demi menjaga keseimbangan

---

<sup>4</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hlm. 81-82

dalam sistem sosial. Sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Namun demikian, ia juga harus mempertimbangkan sistem yang melingkupinya agar setiap fungsi bisa berjalan maksimal. Sistem harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Fungsi proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan.

Dinamika sosial politik tidak lepas dari aktor yang peran di dalamnya. Melihat pentingnya para aktor dalam sistem sosial politik, maka dalam penelitian ini akan digunakan teori fungsionalisme sebagai pijakan teori dalam penelitian ini. Tokoh penting yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori fungsionalisme ini ialah Talcott Persons. Person telah mampu membuat skema untuk memaksimalkan analisis fungsionalis pada setiap sistem. Hal itu tidak lepas

dari proses eksperimen yang dilakukan bersama dengan kelompok studi sosial di Amerika kala itu. Kontribusi Persons terhadap teori fungsionalisme ini ialah penekanan pada empat fungsi penting yang berada pada semua sistem; adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pola pemeliharaan laten (*latent pattern maintenance*) yang biasa dikenal AGIL.<sup>5</sup>Maksud dari masing-masing fungsi tersebut:

- a. Adaptasi (*adaptation*) merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, lalu mengubah ke dalam fasilitas yang bisa digunakan, dan kemudian mendistribusikan ke bagian lain sistem. Intinya, sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan lingkungannya.
- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*). Setiap tindakan haruslah memiliki tujuan dan skala prioritas utama dari tujuan-tujuan yang ada. Sebab itu, sistem harus mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.

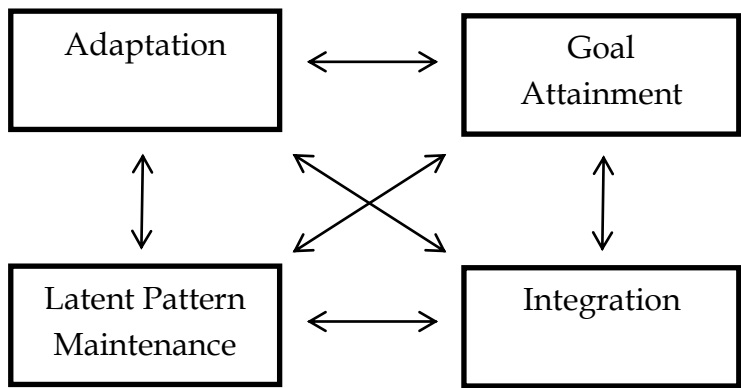
---

<sup>5</sup>Lihat Jonathan H. Turner dan Alexander Maryanski, *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 132-134 dan Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hlm. 157-159. Bandingkan juga dengan Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimanda, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), cet. Ke-8, hlm. 121

- c. Integrasi (*integration*) merupakan fungsi bagi suatu sistem dalam rangka menjaga supaya setiap bagian-bagian berjalan sesuai dengan sirkulasi sistem secara benar agar seluruh sistem berfungsi efektif sebagai satu kesatuan. Fungsi integrasi bisa terpenuhi apabila bagian-bagian dalam sistem berfungsi sebagai satu kesatuan.
- d. Pemeliharaan laten (*latent pattern maintenance*) merupakan fungsi untuk menjaga kesinambungan tindakan suatu sistem sesuai aturan norma agar mampu mempertahankan pola dan mengurangi ketegangan dalam unit sistem. Intinya, latensi berfungsi untuk mencegah disintegrasi atau perpecahan dalam sistem.

Empat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan kerangka kerja dan tidak bisa dipisahkan. Artinya, sistem harus memiliki empat fungsi ini karena keempatnya mempengaruhi secara timbal balik dalam sebuah sistem sehingga suatu fungsional dapat memberikan *input* dan *output* bagi fungsi yang lain. Penekanan pada empat fungsi ini memudahkan dalam skema analisa penelitian ilmu-ilmu sosial, termasuk pada disiplin il-

mu politik. Adapun gambaran dari pola kerjanya ialah sebagaimana bagan berikut ini;



Gambar 1  
*Hubungan antarfungsi menurut Talcott Persons<sup>6</sup>*

Dalam fungsionalisme versi Persons ini, suatu tindakan yang dilakukan aktor juga mencerminkan bagian dari beberapa sistem untuk menjaga fungsi AGIL tersebut. Keempat sistem itu yakni sistem organik, sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem kultural. Keempat sistem ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam melakukan pendekatan analisis berdasarkan empat prasyarat tersebut.<sup>7</sup>

- a. Sistem organisme, atau yang sering juga disebut sistem prilaku, berfungsi untuk memelihara dan

<sup>6</sup>Dikutip dari Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hlm. 159  
<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 159-160 dan Jonathan H. Turner dan Alexander Maryanski, *Fungsionalisme*, hlm. 140

menghadapi masalah-masalah adaptasi (A). Pada dasarnya, adaptasi ditentukan oleh sebagian besar dari sifat-sifat biologis manusia sebagai organisme yang berperilaku agar keseimbangan sistem tidak goyah.

- b. Sistem kepribadian berfungsi untuk mencapai tujuan (G). Sistem ini mengarahkan aktor untuk meraih tujuan yang tidak bersebrangan dengan tujuan bersama yang telah disepakati. Oleh karena itu, sistem kepribadian ini berguna untuk memastikan disfungsi tidak menjadi hambatan berarti demi suatu tujuan bersama untuk keseimbangan sistem.
- c. Sistem sosial menjaga fungsi integrasi (I). Sistem ini mengordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian. Sistem ini memungkinkan aktor untuk tetap bisa menjalankan fungsi integratifnya sehingga sistem tidak mengalami disfungsi.
- d. Sistem kultural berfungsi untuk menjaga pola latensi (L). Nilai dan norma yang berlaku dalam sistem kultural dilembagakan menjadi bagian dari sistem sosial, dan menjadi tolok ukur bagi nilai dan norma itu sendiri.

Keempat sistem tindakan ini menjadi bagian tak terpisahkan dengan empat fungsi dalam teori fungsionalisme Persons yang sangat dibutuhkan dalam kerangka analisis. Adapun gambaran dari pola hubungan sistem tindakan dan empat fungsional tindakan ini ialah sebagai berikut;

<b>Sistem tindakan</b>	<b>Fungsi AGIL</b>
Sistem Prilaku	Adaptif (A)
Sistem Kepribadian	Pencapaian tujuan(G)
Sistem Sosial	Integrasi (I)
Sistem Budaya	Pemeliharaan pola laten (L)

Gambar 2  
Sistem tindakan dan fungsi AGIL<sup>8</sup>

Dari gambaran di atas, maka tindakan politik aktor dapat dianalisa sesuai dengan fungsinya yang berpengaruh terhadap sistem. Hal ini akan menjadi tolok ukur apakah tindakan tersebut akan memberikan keseimbangan pada sistem politik yang berlaku ataukah tidak.

Kajian ini merupakan kajian sosial politik yang hanya perlu memodifikasi sedikit dari pola skema fungsionalisme Persons yang dibangun untuk penelitian

---

<sup>8</sup>Dikutip dari Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hlm. 160

sosial menjadi skema fungsionalisme untuk penelitian politik. Dalam penelitian ini, nalar fungsionalisme yang digunakan ialah melihat tindakan aktor dari fungsi integratifnya (I) yang berpengaruh terhadap sistem kepribadian, lalu sistem kepribadian itu akan menjadi fungsi adaptasi (A) yang berdampak pula pada sistem perilaku, kemudian hasilnya akan menjadi fungsi pencapaian tujuan (G) yang juga akan berdampak pada sistem budaya, lantas hal itu akan memunculkan fungsi latensi (L) yang berpengaruh terhadap sistem sosial dan politik. Dengan demikian, menurut hemat penulis, teori fungsionalisme Talcott Persons sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini.

Sebagaimana diungkapkan Kuntowijoyo, dalam penelitian sejarah sosial memerlukan strategi berupa model yang berfungsi sebagai inspirasi heuristik dalam pencarian, pengumpulan dan penyusunan<sup>9</sup>. Selain karya-karyaa dari kepustakaan, sumber data yang digunakan juga manuskrip dan artefak sejarah yang tersimpan di beberapa lokasi dan museum-museum di Provinsi Kepulauan Riau, seperti museum Masjid Penye-ngat, museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah di

---

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hal 42.



Tanjungpinang dan museum Linggam Cahaya di Daik Lingga.

Data yang terhimpun selanjutnya ditelaah sesuai dengan kebutuhan data dalam kajian ini. Sebagai ilmu bantu, penelitian ini juga menggunakan ilmu filologi terapan,<sup>10</sup>yakni mencari teks yang paling baik untuk bisa dipahami dan kemudian dijadikan sebagai landasan kajian.

Data yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan laporan penelitian dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menguraikan pembahasan dari tema yang dimaksud sekaligus menganalisis.<sup>11</sup> Untuk memudahkan penyampainya, maka penulis menggunakan pola induktif, dengan menguraikan pokok-pokok yang menjadi pembahasan, kemudian melakukan pemetaan lebih detail atas pokok dan diakhiri dengan suatu simpulan.

Kajian ini dibagi dalam beberapa bab dan bagian untuk mendapatkan gambaran utuh perihal faktor eksternal atau intervensi asing yang mempengaruhi politik pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Setelah bagian pendahuluan, pada bagian kedua mengu-

---

<sup>10</sup>Nabilah Lubis, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*, hlm. 93

<sup>11</sup>Lihat Nyoman Kutha Ratna, *Metodelogi Penelitian*, hlm. 336

pas perihal asal usul kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga yang tidak lepas dari politik emporium kerajaan Melayu. Karena kerajaan ini memiliki realitas politik yang terus berkembang, maka ulasan mengenai hal itu akan dibagi pada tiga bagian, yakni periode kerajaan Melayu di Malaka yang merupakan kerajaan melayu kuno hingga menjadi kerajaan melayu Islam awal, periode kedua pada masa kerajaan saat berpusat di Johor dan Bintan, dan periode ketiga ketika kerajaan berpusat di Daik Lingga dan Penyengat. Kajian ini untuk mengungkap perjalanan panjang kerajaan yang ibu kota kerajaanya telah berkali-kali berpindah sehingga memberikan implikasi politis atas penamaan kerajaan. Pada bab ini juga, akan dibahas perihal pengaruh Islam sistem pemerintahan, produk hukum dan adat istiadat yang ada pada kerajaan.

Bagian ketiga akan menjawab pertanyaan pertama yang diajukan dalam bab pendahuluan. Sebab itu, bab ini akan mengupas perihal faktor eksternal yang akan mempengaruhi terhadap sistem politik dan pemerintahan kerajaan. Realitas dan dinamika sosial politik yang dihadapi oleh kerajaan ini, khususnya “peristiwa besar”, akan dikaji lebih mendalam sesuai periodeisasi

sebagaimana tertera pada judul di atas. Sedangkan Bab keempat akan menjawab pertanyaan kedua yang tertera pada bab pendahuluan. Bab ini akan menganalisa dampak dari faktor eksternal tersebut terhadap sistem politik dan pemerintahan kerajaan. Pada bagian ini juga akan dibahas perihwal relevansi penelitian ini terhadap kondisi kekinian yang terjadi di Indonesial.

Adapun bagian kelima adalah kesimpulan yang merupakan sintesa dari temuan-temuan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan. Pada bab ini juga akan ditarik satu garis korelasi peristiwa masa lalu tersebut sebagai cermin bagi masa depan.

## **BAB II**

### **MENGENAL KERAJAAN JOHOR-PAHANG-RIAU-LINGGA**

Sejarah kerajaan Melayu di Riau dan Semenanjung Malaya memiliki kronik panjang dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya.<sup>12</sup> Wilayah yang dulunya sebagai daerah taklukan, berganti menjadi daerah penakluk. Daerah yang dulunya bergantung dengan yang lain, kini menjadi penentu bagi geliat ekonomi daerah lain. Kerajaan yang telah menjadi imperium berubah menjadi negara yang terbelah oleh konflik kekuasaan dan politik ekonomi. Tentu saja, memahami fragmen sejarahnya tidak akan mampu memberikan gambaran utuh terhadap perkembangan dan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang di kerajaan Melayu ini.

Ada faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi dinamika sosial politik di kerajaan Melayu ini, khususnya dinamika ekonomi yang berkembang ketika itu. Era dominasi kolonialisme bangsa Eropa telah mengubah haluan politik ekonomi pada setiap kera-

---

<sup>12</sup>Istilah kerajaan Melayu yang dimaksud dalam tulisan ini ialah mengacu pada dua daerah, yakni Riau dan semenanjung Malaya atau Malaysia.

jaan di nusantara. Akibatnya, terjadi kerjasama-kerja sama atau koloni yang tidak seimbang antara tuan rumah dengan tamunya yang kemudian menimbulkan banyak konflik kepentingan politik, khususnya dalam perebutan tampuk kekuasaan di setiap kali terjadi estafet kepemimpinan. Secara teoritik, tidak ada kekuasaan yang tidak lepas dari pengaruh luar. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan di kerajaan Melayu ini telah mengalami dinamika cukup panjang.

Maka paparan secara kronikal di bagian ini menitikberatkan pada pendekatan sejarah politik dan ekonominya. Bagian ini hendak melihat dinamika yang terjadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok pembahasan penelitian ini. Berikut adalah kronik yang secara garis besar menjelaskan tentang tiga fase kekuasaan kerajaan, yakni Malaka, Johor-Riau, Riau-Lingga.

### **A. Berebut Kuasa di Selat Malaka**

Malaka tumbuh sebagai kerajaan penting sebagai jalur perdagangan internasional. Kerajaan yang merupakan kelanjutan dari Sriwijaya ini mencapai puncaknya pada abad ke 14 hingga 16. Hal ini tidak lepas dari

faktor sejarah berdirinya kota ini yang bermula lahirnya kerajaan Melaka oleh Parameswara, seorang bangsawan Sriwijaya dari Palembang, pada tahun antara 1400 hingga 1403. Parameswara merupakan turunan ketiga dari Sri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Sri Tri Buana (Sang Nila Utama), seorang penerus raja Sriwijaya. Sang Nila Utama mendirikan Singapura Lama dan berkuasa selama 48 tahun, Kekuasaannya dilanjutkan oleh puteranya Paduka Sri Pekerma Wira Diraja (1372–1386) yang kemudian diteruskan oleh cucunya, Paduka Sri Rana Wira Kerma (1386–1399). Pada tahun 1401, Parameswara putra dari Sri Rana Wira Kerma, mengungsi dari Tumasik setelah mendapat penyerangan dari Majapahit.

Parameswara pada awalnya menjadi raja di Singapura pada tahun 1390-an, negeri ini kemudian diserang oleh Jawa dan Siam, yang memaksanya berpindah lebih ke utara. Dalam kronikal Dinasti Ming, tercatat bahwa Parameswara telah tinggal di ibukota baru di Melaka pada 1403, tempat armada Ming yang dikirim ke selatan menemuinya. Ketika itu, dia diduga meminta bantuan kepada pasukan Dinasti Ming sehingga datang utusan menjawab permintaan tersebut. Inilah mula-

mula lahirnya Malaka sebagai pusat ibukota kerajaan sekaligus menjadi pusat geliat ekonomi.

Terkait dengan nama Malaka, dari sumber lain menyebutkan bahwa para pedagang Arab yang menjadikan bandar kota itu sebagai tempat persinggahan sekaligus sebagai tempat transaksi perdagangan. Dan kuat dugaan nama Malaka itu berasal dari bahasa Arab "*malaqa*" yang artinya tempat pertemuan. Perdagangan di kawasan ini semakin meningkat karena berbagai rute perdagangan yang telah dibuka oleh para pengembara dan tim ekspedisi dari kerajaaan-kerajaan Arab dan Eropa. Jalur sutera yang menghubungkan antara Asia Barat ke Tiongkok awalnya dibuka oleh Ibnu Batutah kemudian diikuti oleh Tomi Pires. Jalur itu pun dikenal sebagai jalur perdagangan yang cukup masyhur walaupun para musafir harus menghadapi rintangan alam yang sulit, kontur tanah berbukit dan cuaca. Sedangkan jalur laut pertama kali dibuka oleh Portugis dalam pelayarannya melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Mereka akhirnya berhasil bersandar di Malaka, lalu ke beberapa daerah lainnya di wilayah timur Nusantara, seperti ke Ternate hingga Timor Leste. Inilah cikal bakal kehadiran bangsa Eropa.

Ketika itu ada dua suku perantau yang memiliki peranan cukup penting di jalur perdagangan Melayu, yakni suku Minangkabau dan Bugis. Keduanya termasuk giat selama berada di perantauan dan hingga saat ini, kedua suku ini juga berhasil “menjadi Melayu”. Peranan kedua suku ini menguatkan posisi strategis kerajaan-kerajaan di ujung utara Sumatera dan juga kerajaan di Semenanjung Malaya. Para perantauan Bugis periode ini nyaris tidak terdapat jejak historisnya kecuali penyebutan tentang rute-rute pelayaran mereka yang tersebar di Nusantara. Hal ini disebabkan motif perantauan mereka karena motif perekonomian yang memungkinkan mereka untuk berpindah atau pulang setelah mencapai keinginannya.

Umumnya, suku bangsa dari Nusantara yang merantau ke semenanjung Malaya dan juga beberapa daerah di Sumatera untuk melakukan perdagangan. Peningkatan aktivitas perdagangan di selat Malaka yang menjadi penghubung bagi arus barang untuk ke India, Semenanjung Arab dan Eropa. Di sana pula sering menjadi tempat pertemuan dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok yang terkenal dengan hasil pakaian dan porselinnya. Sedangkankan India, Arab, Eropa dan



Tiongkok berharap mendapatkan rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Kala itu, beberapa orang Bugis menjadi penyedia jasa pelayaran. Mereka melayani berbagai rute perdagangan karena meningkatkan kebutuhan pelayaran kala itu yang menghubungkan beberapa pusat perdagangan di Nusantara ke bandar-bandar perdagangan di Malaka dan Aceh.

Posisi penting Malaka ini membuat banyak kerajaan berusaha untuk merebutnya, termasuk kerajaan dari Tiongkok, Majapahit, Prahyanan, dan kerajaan Makassar. Kerajaan Makasar di bawah raja Karaeng Same' Riluakang pernah melakukan penyerangan pada 1420 M dengan sekitar 200 armada yang baru pulang dari upaya penaklukan kerajaan Siam. Dengan jumlah sebanyak itu, ekspedisi tersebut termasuk ekspedisi yang cukup berani di tengah kekuatan kerajaan Malaka yang juga berhubungan baik dengan Samudera Pasai di Aceh. Dengan jumlah pasukan sebanyak itu, tentu sebagian dari mereka juga ada yang menetap, baik karena untuk mendudukkan kekuatannya maupun perawatan terhadap prajurit yang luka selama peperangan berlangsung. Perebutan itu menandakan bahwa Malaka memiliki peran penting dalam perdagangan. Hal ini

juga tentunya membuat saudagar dari Bugis Makassar semakin lebih mengenal daerah ini dan tentu pula menjadi tujuan perdagangan mereka.

Perebutan kuasa di tanah Malaka ini mencapai puncaknya ketika Sultan Mahmud Syah memerintah Malaka sampai tahun 1511. Ketika itu, ibu kota kerajaan tersebut diserang pasukan Portugal di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Serangan dimulai pada 10 Agustus 1511 dan pada 24 Agustus 1511 Malaka jatuh kepada Portugal.

Kenyataan ini membuat kota Malaka tidak lagi menjadi penuh di bawah kontrol sultan, melainkan sudah masuk campur tangan dari Portugis. Meski demikian, sultan tidak tinggal diam, melainkan masih mencari cara untuk dapat kembali merebut Malaka menjadi sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Pola yang diterapkan ialah dengan cara bergrilya mempertahankan kerajaan dari berbagai serangan dari luar. Sultan Mahmud Syah ketika itu memindahkan pusat pemerintahannya ke Pahang. Hal itu dilakukan guna mempertahankan tampuk kekuasaan serta monaluk takluk dan patuh terhadap penjajah. Setelah dari Pahang, Sultan Mahmud Syah berpindah lagi ke Johor dan mendi-

rikan istana di sana. Kemudian, nama kerajaan juga berubah dan menjadi Kerajaan Johor.

Di tengah situasi perdagangan global dengan bangsa Barat itu, kerajaan Johor-Pahang-Riau juga menjadi bagian penting. Perebutan kuasa di selat Malaka tidak kunjung berhenti sebab sejak kehadiran Portugis, silih berganti negara-negara imprealis Eropa berebut kuasa dan berupaya menaklukan serta menguasai Malaka, di antaranya Inggris, Spanyol dan Belanda. Kerajaan Belanda kemudian memainkan peranan yang cukup panjang sehingga menjadi penguasa kunci di Malaka. Hal itu membuat kolonial mencari cara untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan melalui perjanjian politik perdagangan. Portugis telah melakukan pendekatan dengan kerajaan Melaka dan juga Samudera Pasai di Aceh. Inggris melakukan perdagangan di Bengkulu, Bangka dan Sumatera bagian selatan. Sedangkan Belanda telah menjadi juragan baru di tanah Jawa dan Makassar. Masing-masing bangsa asing itu saling menawarkan perjanjian-perjanjian mengikat agar bisa memonopoli perdagangan dari hasil bumi di Nusantara. Hal demikian pun berlaku dengan kerajaan Johor-Pahang-Riau. Beberapa kali perjanjian perdag-

ngan dilakukan dengan Belanda ketika berhasil mengambil alih pengaruh dari Portugis. Tetapi, Inggris juga melirik daerah tersebut karena menilai geografis kerajaan merupakan jalur perdagangan internasional.<sup>13</sup>

Tak pelak, dalam setiap periode kekuasaan, selalu saja terjadi polemik, baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Pengaruh dari luar ialah kolonialisme yang dilakukan bangsa Eropa yang terus melancarkan aksinya untuk menguasai daerah-daerah di Nusantara. Bahkan, ketika peperangan antar bangsa Eropa itu terjadi, polemik di daerah daerah jajahan meraka juga terjadi. Maka, tidak heran bila dalam catatan sejarah, tidak jarang sesama bangsa Eropa juga saling berperang untuk merebutkan daerah koloni. Apabila bangsa yang satu kalah, daerah koloninya juga dianggap telah takluk. Sedangkan faktor internalnya ialah polemik perebutan kekausaan di kerajaan. Ketika sultan terakhir trah Malaka wafat tanpa keturunan, terjadi gonjang-ganjing perihal siapa pewarisnya. Polemik itu kemudian disudahi dengan diangkatnya Datok Bendahara Sulaiman menjadi penerus tahka kerajaan

---

<sup>13</sup>Di Dabo Singkep, Sultan Mahmud Syah III telah membuka pertambangan timah yang hasilnya banyak dijual kepada Inggeris. Raja Ali Haji, *Tuhfat al-Nafis*, dalam Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, hlm. 447 dan Abdul Malik, *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan*, hlm. 137

Johor-Pahang. Akan tetapi, seorang yang mengaku keturunan Sultan Mahmud Syah II menuntut haknya atas tahta kerajaan dan melakukan perlawanan. Dialah yang dalam sejarah dikenal dengan nama Raja Kecil. Perebutan tahta di internal kerajaan ini membuat polemik dan perang saudara cukup panjang. Sultan Sulaiman kemudian meminta bantuan kepada saudagar Bugis sering melakukan perjalanan perdagangan di sekitar Kepulauan Riau. Dalam perebutan tahta ini, Sultan Sulaiman mendapatkan kemenangan dan memukul mundur Raja Kecil beserta pendukungnya hingga melarikan diri ke Kampar.

Secara perlahan, Melayu dan Bugis semakin kokoh dalam menjalankan roda kekuasaan. Mereka tidak lagi berpolemik terlalu lama perihal kekuasaan, melainkan mulai fokus untuk menghalau penjajah yang sering menjerak kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan perjanjian-perjanjian yang merugikan. Dalam catatan sejarah, beberapa kali peperangan terjadi saat berpolemik dengan penjajah. Sejarah juga mencatat perlawanan di Tanjungpinang dan Melaka begitu heroik. Hal ini tidak lepas dari seorang tokoh yang dikenal dengan Raja Haji Fisabilillah (w.1784). Askar yang dipimpin oleh Raja

Haji berhasil memukul mundur pasukan Belanda tetapi berakibat pada penyerangan Belanda terhadap Tanjungpinang. Perang berlangsung selama dua tahun 1782-1784. Hal ini membuat situasi sosial dan ekonomi masyarakat mulai melemah.

Pada puncak kejayaannya Kesultanan Johor-Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Pahang, Selangor, Singapura, Kepulauan Riau, dan daerah-daerah di Sumatera seperti Riau Daratan dan Jambi. Kerajaan Johor-Riau mulai mengalami kemunduran pada tahun 1812 setelah wafatnya Sultan Mahmud Syah III Yang Dipertuan Besar Johor-Pahang-Riau-Lingga ke XVI, hal ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara dua putra sultan, Yaitu Tengku Hussain/Tengku Long dan Tengku Abdul Rahman. Ketika putra tertua Sultan Mahmud Syah III yaitu Tengku Hussain/Tengku Long sedang berada di Pahang, dengan tidak diduga pada tanggal 12 Januari 1812 Sultan Mahmud Syah III mangkat. Menurut adat istiadat di Istana, seseorang pangeran Raja hanya bisa menjadi Sultan sekiranya dia berada di samping Sultan ketika mangkat, oleh karena itu Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi Yang Dipertuan Besar Johor-Pahang-Riau-Lingga ke XVII meneruskan Sultan

Mahmud Syah III menggantikan saudara tertuanya Tengku Hussain/Tengku Long yang ketika Sultan Mahmud Syah mangkat dan dimakamkan di Daik Lingga, Tengku Hussain masih berada di Pahang. Sekembalinya Tengku Hussain dari Pahang menuntut haknya sebagai putra tertua untuk menjadi Sultan menggantikan Sultan Mahmud Syah III. Tengku Hussain merasa lebih berhak menjadi Sultan, daripada adiknya Tengku Abdul Rahman. Sebelum meninggal Sultan Mahmud Syah III pernah berwasiat, yaitu menunjuk Tengku Hussain/Tengku Long sebagai Sultan Johor-Riau dan Tengku Abdul Rahman, agar berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji.

### **B. Bunda Tanah Melayu Tetap Dikenang**

Kondisi sosial ekonomi daerah sekitar selat Malaka yang begitu menjanjikan serta perlunya melakukan perluasan daerah koloni, Belanda tertarik untuk melakukan pendudukan terhadap Riau. Upaya itu telah dilakukan Belanda dan mengalami tarik ulur dengan Inggris. Namun, ketika perang antara kerajaan Johor Riau dengan VOC Belanda pecah di Malaka, mempengaruhi suasana politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Ketika itu, pasukan yang dipimpin Raja Haji melakukan pe-

nyerangan terhadap VOC di Malaka dengan bala bantuan dari beberapa kerajaan sekitar. Peperangan itu tak lain ialah untuk menjaga marwah kerajaan dan atas pembangkangan kolonialis terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah di buat.

Hulu Riau yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan setelah perpindahan dari Johor mulai dilirik juga oleh Belanda dengan membangun kantor perwakilan di Tanjungpinang. Mereka membangun benteng pertahanan di bagian bukitnya agar bisa memantau lalu lalang penguasa dan pembesar kerajaan yang melewati selat itu. Di masa yang lengang dan pilihan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat, Tanjungpinang dan sekitar tumbuh menjadi daerah pemukiman dengan penghasilan pertanian. Hasil pertanian yang cukup banyak diminati ialah gambir. Secara perlahan, daerah sekitar Tanjungpinang juga semakin ramai didatangi pendatang. Kini, banyak daerah di Tanjungpinang dinamakan berdasarkan daerah asal penghuninya, seperti Kampung Bugis.

Dinamika sosial ekonomi Tanjungpinang juga mengalami pasang surut. Hal ini tidak lepas dari kondisi politik ketika itu. Puncak dari krisis yang dialami ke-



rajaan dan rakyatnya di Tanjungpinang ialah ketika terjadi peperangan panjang dengan Belanda sehingga membuat situasi sosial dan ekonomi yang menjadi goncang. Pasca peperangan dengan Belanda antara 1782-1784, para pembesar kerajaan pun memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan ke Daik di Pulau Lingga yang berada di selatan pulau Bintan pada 1787 M.<sup>14</sup> Perpindahan itu sebuah eksodus besar karena kerajaan tidak ingin mengorbankan rakyat lebih banyak sebab benteng pertahanan di Tanjungpinang tidak lagi kokoh. Dalam *tuhfah an-Nafis* disebutkan, perpindahan dengan armada laut yang cukup besar itu membuat masyarakat Melayu dan Bugis juga turut pindah dan hanya tinggal perantau dari Tiongkok yang tetap berladang gambir di sekitarnya.<sup>15</sup>

Kehidupan baru di mulai kembali di Daik dengan pembukaan perkampungan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh raja. Sebelum Sultan Mahmud Syah III berkuasa, Daik juga sempat menjadi tempat tinggal sementara Sultan Johor ke-7, Sultan

---

<sup>14</sup>Ketika itu Sultan Mahmud Riayat Syah masih kanak-kanak sehingga kendali kerajaan dipegang penuh oleh Yang Dipertuan Muda. Upaya perpindahan itu juga untuk menyelamatkan sultan dari berbagai bahaya ancaman terhadap dirinya seba kekalahan pasukan Raja Haji telah mengurangi jumlah besar askar kerajaan.

<sup>15</sup>Lihat Raja Ali Haji, *tuhfah an-Nafis*,

Abdullah Ma'ayat Syah (w.1623), ketika menghindari pencarian dari pasukan kerajaan Aceh. Pemilihan Daik sebagai pusat kerajaan lain bukan tanpa alasan sebab daerah ini memiliki beberapa pintu masuk serta sistem pertahanan yang lebih memadai. Lambat laun, Daik pun menjelma menjadi ibu kota kerajaan meskipun pusat pemerintahan berada di Penyengat. Apalah artinya raja tanpa rakyat. Daik memang tidak seramai Riau dan membutuhkan bertahun-tahun untuk membangunnya. Bahkan, menurut cerita rakyat yang berkembang, kala itu kapal-kapal yang melintasi perairan Lingga sengaja diberhentikan untuk bersandar ke palabuhan dan melakukan perdagangan. Hal ini strategi agar para pelaut mengetahui keberadaan kota baru itu dan menjadikannya sebagai tempat untuk melakukan perdagangan, menggantikan Tanjungpinang yang telah dikuasai oleh Belanda.

Daik terus berkembang, apalagi ketika masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Badrum Alamsyah II (w. 1883) dengan kebijakan pada sektor pertanian dan perkebunan. Rawa-rawa yang terbentang luas di sulap menjadi area persawahan dan juga kebun sagu. Sedangkan di daerah yang lebih tinggi, di tanam gambir,

pala, cengkeh, dan beberapa komoditi lainnya. Pertumbuhan itu juga menarik perhatian dari warga pulau lain untuk mencari peruntungan ekonomi. Sedangkan di Singkep, pertambangan timah juga mengalami pertumbuhan pesat dan juga menjadi pemasukan utama kerajaan. Kerajaan Lingga-Riau pun semakin diminati pendatang dari Jawa, Bangka, Jambi, Tionghoa, Bugis, dan juga daerah lainnya. Maka muncullah perkampungan-perkampungan baru yang sering disebutkan dengan kelompok yang menetap. Seperti kampung atau tempat tinggal kebanyakan orang Cina menjadi Kampung Cina, kampung yang banyak didiami orang Bugis disebut Kampung Bugis, dan begitu juga dengan beberapa nama kampung di Daik lainnya yang sampai saat ini masih dipertahankan sesuai dengan asal orang yang menetap di daerah itu. Orang-orang atau keturunan Bugis yang berada di Daik pun terus bertambah. Hal ini sangat wajar karena pada saat itu daerah Melayu menjadi primadona bagi pelaut.

Persaingan bangsa Eropa itu telah menjadi bagian sejarah panjang kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Mereka sendiri saling berebut dengan menjadikan pribumi sebagai pasukan tempurnya. Nyaris

tidak pernah ada konfrontasi langsung antara bangsa Eropa di Nusantara, tetapi rakyat pribumi yang selalu diadu untuk saling berhadapan. Perebutan pengaruh itu akhirnya didominasi oleh Belanda dan Inggris untuk wilayah Barat. Keduanya terus bersaing mendapatkan pengaruh. Persaingan antara Belanda dan Inggris pun mencapai puncaknya hingga kedua negara itu membuat suatu kesepakatan wilayah koloninya yang disebut dengan Traktat London pada 1824.<sup>16</sup>

Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Belanda menguasai seluruh daerah yang berada di Jawa dan Sumatera, sedangkan Inggris menguasai daerah perdagangan untuk wilayah Semenanjung Malaysia. Sejak saat itu pula, kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga terpisahkan menjadi dua kerajaan. Riau-Lingga menjadi daerah kesultanan tersendiri di bawah perjanjian dagang dengan Belanda, sedangkan Johor-Pahang menjadi kerajaan yang lain pula di bawah perjanjian perdagangan dengan Inggris.<sup>17</sup> Inggris kemudian memindahkan pusat pemerintahannya di Asia Tenggara dari Bengkulu ke Penang dan menjadikan Singapura sebagai markas perwakilan dagang Inggris dan pusat perdagangan di

---

<sup>16</sup>Erwiza Erman, *Sejarah Kesultanan Riau-Lingga*, hlm.67-68

<sup>17</sup>Jan Van der Putten dan Al Azhar, *Di dalam Berkenalan Persahabatan*, hlm. 2

Asia Tenggara. Inggris terus mempengaruhi kerajaan Johor agar kekuasaannya semakin kokoh.<sup>18</sup> Dampak politik dari Traktat London ini pun telah dirasakan hingga saat ini dengan terbentuknya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara yang berdiri sendiri.

Pasca Traktat London, secara politis kerajaan Riau-Lingga telah dikuasai oleh Belanda, namun perlawanan itu masih berlangsung. Setiap sultan memiliki cara tersendiri dalam melakukan perlawanannya, termasuk perlawanan dalam perekonomian yang menjadi tujuan utama imperialisme Eropa kala itu. Hal itu di manfaatkan juga oleh kerajaan dalam menjalin perdagangan dengan bangsa Eropa lainnya secara gelap untuk terus bisa bertahan dengan membuka perdagangan gelap dengan Inggris. Hal itu berlangsung lama karena sistem yang diterapkan luput dari pantauan Belanda. Sultan Riau Lingga, dimulai sejak Sultan Mahmud Syah III—yang kuasa pada 1761-1812, tidak melakukan monopoli terhadap hasil pertambangan timah di Singkep dan perkebunan di Lingga umumnya.

Para sultan hanya menerapkan pajak dari setiap barang yang diterima oleh para penampung barang-

---

<sup>18</sup>Arifin Omar, *Bangsa Melayu: Konsep Bangsa Melayu dalam Demokrasi dan Komuniti 1945-1950*, Selangor: SIRDC, 2015, hlm. 8-10

barang. Kemudian, sebagian dari hasil pertambangan dan perkebunan itu pun dijual kepada Inggris dan sebagian lainnya dijual kepada Belanda. Hasil penjualan itu digunakan untuk keperluan kebutuhan kerajaan yang mendapatkan kontrol ketat dari Belanda.<sup>19</sup> Puncak kejayaan perekonomian sejak kerajaan berpusat di Daik Lingga terjadi pada pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II (1857-1883). Ia telah menghadirkan beberapa pengetahuan baru dengan membuka persawahan dan perkebunan di Daik Lingga. Hasil pertanian menjadi salah satu andalan pendapatan kerajaan dan sumber bagi kesejahteraan rakyat.

---

<sup>19</sup>Raja Ali Haji, *Tuhfat al-Nafis*, hlm. 447



## BAB III

### DIASPORA BUGIS DI TANAH MELAYU

#### A. Pelaut Penakluk Samudera

Historiografi Nusantara mencatat peranan penting orang Bugis-Makassar<sup>20</sup> dalam pelayaran. Mereka termasuk suku yang piawai dalam menaklukan lautan. Mereka dikenal sebagai saudagar pelayaran dan ahli navigasi yang ulung.<sup>21</sup> Hal inilah yang kemudian mengantarkan mereka mengenal beberapa daerah lain di luar Sulawesi hingga Nusantara, kota-kota perdagangan di pantai Asia Tenggara, Tiongkok dan juga India. Kemahiran dalam navigasi dan kemampuan berdagang yang ulet menjadikan mereka dikenal sebagai pelaut-pelaut tangguh, yang tidak hanya berani mengarungi

---

<sup>20</sup>Pada mulanya Bugis dan Makassar adalah dua suku yang berbeda. Orang Bugis merupakan kesatuan dari masyarakat yang hidup di bawah kerajaan Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang. Sedangkan orang Makassar adalah mereka yang hidup di kerajaan Gowa. Hubungan antara Bugis dan Makassar terjalin karena adanya pertalian pernikahan, khususnya di kalangan kerluarga kerajaan. Dan pada era kolonialisme Belanda, masyarakat keduanya banyak merantau karena situasi dan kondisi di daerah mereka yang tidak kondusif. Kala perantauan itulah banyak orang Makassar disebut atau mengaku sebagai Bugis.

<sup>21</sup>Meski terkenal sebagai pelaut, masyarakat Bugis juga mahir dalam pertanian dan kerajinan. Pertanian ini menjadi bagian penting pada setiap masyarakat sebab ia mampu memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat Bugis di daratan sangat mahir dalam bidang ini sedangkan masyarakat bugis di pesisir mahir pula di dunia pelayaran. Lihat Christian Palres, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), hlm. 263-320



lautan dan samudera, tetapi juga garang menghadapi perompakan di tengah laut.

Orang Bugis mengenal daerah luar karena faktor perdagangan. Hal ini memudahkan mereka dalam mengambil sikap pada perjalanan hidup karena banyaknya kapal-kapal dagang dan jasa pelayaran yang menghubungkan dengan berbagai daerah lain. Perantauan lintas pulau banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, yang umumnya dilakukan oleh para saudagar dan konglomerat Bugis. Sedangkan perantauan dalam daerah di sekitaran Sulawesi Selatan lebih banyak dilakukan oleh orang Bugis dari kalangan menengah ke bawah yang juga berupaya untuk mengubah nasib perekonomian mereka agar lebih baik.

Beberapa faktor umumnya orang Bugis meninggalkan kampung halaman berhubungan upaya mencari pemecahatan terhadap konflik pribadi, menghindari penghinaan, kondisi tidak aman, atau keinginan untuk melepaskan diri dari kondisi sosial yang tidak memuaskan. Perantauan seperti ini, sifatnya lebih sangat temporal yakni mereka hanya berupaya untuk mengais rezeki dan apabila sudah mendapatkan keinginan, mereka cenderung untuk pulang kembali ke kampung halaman.

mananya. Perantauan model seperti inilah yang disebutkan oleh Pelras sebagai merantau karena faktor sosial ekonomi. Tetapi, di lain pihak, ada juga perantauan karena faktor sosial politik sebagaimana yang dilakukan oleh Daeng Rilakka ke Melayu dan perantauan beberapa bangsawan atau saudagar ke Kalimantan Timur pasca perjanjian Bongaya 1667.<sup>22</sup>

Kedua faktor tersebut memang tidak salah bila melihat konteks dari masing-masing sifat dan penyebab perantauan itu terjadi. Pelras yang meneliti orang Bugis dari perspektif sosial antropologi memang tidak secara langsung menolak faktor lain selain faktor ekonomi. Tetapi, menurut Pelras, tradisi merantau atau migrasi yang dilakukan oleh orang Bugis lebih banyak disebabkan oleh faktor untuk bertahan hidup dari kemalaratan ekonomi di daerah asal mereka. Hal itu memang terjadi di kalangan masyarakat ketika tempat bercocok tanam tidak produktif sebab kesulitan air, kandungan bebatuan yang lebih dominan, serta kontur tanah yang tidak stabil. Dengan kondisi tersebut, suatu masyarakat memang tidak akan bisa bertahan sebab masyarakat darat yang agraris selalu mengandalkan tanah untuk meng-

---

<sup>22</sup>Lihat Pelras, *Manusia Bugis*, dan bandingkan dengan Andi Ine Kusumah, *Migrasi dan Orang Bugis*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008)

hasilkan pangan. Pendapat Pelras ini juga dikuatkan dengan bukti seorang bangsawan penerus tahta kerajaan yang merantau ke Kutai kembali ke tanah kelahirannya ketika suasana politik telah kembali kondusif. Apalagi, ketika itu ia dinobatkan sebagai penerus tampok kepemimpinan.

Sedangkan pendapat yang diungkapkan oleh Andi Ine Kusumah, dalam penelitian tentang migrasi orang Bugis ke Johor-Riau, perpindahan itu karena faktor politik. Pasalnya, penjanjian Bungaya yang dilakukan oleh kerajaan Gowa dengan Belanda telah merusak sistem politik yang berlangsung di Sulawesi Selatan umumnya. Mereka yang tidak setuju kemudian merantau demi menjaga marwah daripada harus tunduk di bawah kekuasaan asing. Hal ini, menurut Ine Kusumah, merupakan migrasi politik sehingga diaspora masyarakat Bugis ke berbagai daerah lainnya, seperti ke Kutai, Banjarmasin, Kalimantan Barat dan juga ke Riau pasca penjanjian Bungaya itu lebih disebabkan oleh faktor politik. Faktor ini merupakan faktor pendorong utama terjadinya perantauan dan migrasi sebab dampak kebijakan politik itu juga berakibat pada perekonomian mereka. Dengan sistem monopoli yang dilaku-

kan Belanda, membuat perdagangan hasil bumi di Sulawesi Selatan sulit dipasarkan sehingga akan mengganggu perekonomian masyarakat secara umum. Sedangkan pilihan mengenai tempat tujuan itu sangat bergantung dengan pilihan masing-masing sebab Belanda juga membatasi orang-orang Sulawesi Selatan dalam perantauan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Bungaya.

Dengan demikian, sebenarnya perantauan orang Bugis tidak hanya karena satu faktor saja melainkan banyak faktor yang sangat bergantung dengan situasi dan kondisi pada masanya. Oleh sebab itu, untuk memudahkan kajian dalam mengetahui perantauan dan migrasi orang Bugis ke tanah Melayu, akan dibedakan berdasarkan periodisasi. A Rasyid Asba membagi periodisasi perantauan Bugis ke tanah Melayu dalam tiga periode, yakni pra Islamisasi, selama proses Islamisasi, dan pasca kerajaan Gowa dan Wajo jatuh ke tangan VOC.<sup>23</sup> Ia menilai, kedua suku ini saling mempengaruhi satu sama lain pada masing-masing daerah. Menurutny, kehadiran Islam yang dibawa oleh ulama dari tanah Melayu telah memberikan pengaruh besar terha-

---

<sup>23</sup>A Rasyid Absa, *Susur Galur Melayu Bugis*, makalah.

dap sistem sosial dan budaya masyarakat di kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Tidak sedikit pula orang-orang melayu menjadi pejabat karena kemampuan dalam menulis sehingga diangkat menjadi juru tulis dan pejabat administrasi lainnya. Memang, kehadiran ulama dari tanah Melayu ini telah memberikan banyak informasi tentang melayu itu sebagai mana telah dibahas pada bagian awal bab ini.

Sedangkan kehadiran orang-orang Bugis di tanah Melayu pada periode awal, menurut A. Rasyid Asba, karena orang Bugis adalah berlayar adalah masyarakat pesisir sehingga ketika merantau juga hidup di pesisir dan mereka dijuluki juga sebagai *the sea men* atau orang laut.<sup>24</sup> Kedua adalah saat proses Islamisasi yang dilakukan kerajaan Gowa hingga menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan masyarakat merantau atau bermigrasi. Sedangkan periode ketika itu, memang lebih kental dengan nuansa politik karena penaklukan Belanda terhadap kerajaan Gowa dan Wajo. Opu Daeng Relakka beserta lima anaknya yang kemudian bermigrasi ke tanah Melayu, memang senyatanya setelah terjadi-

---

<sup>24</sup>Pendapat ini perlu ditelaah dan diteliti lebih lanjut sebab Orang Laut—atau sering juga disebut Suku Laut—yang berada di Kepulauan Riau saat ini dikenal sebagai masyarakat tradisional yang memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan Orang Laut dari berbagai daerah lainnya. Lihat.....

nya proses Islamisasi di kerajaan Sulawesi Selatan. Dan pada saat kolonialisme Belanda telah menguatkan cengkramannya usai menaklukan Gowa dengan perjanjian Bungaya, masyarakat telah banyak menganut Islam dan Islam pun telah menjadi agama resmi kerajaan.

Dalam buku ini, gelombang perantauan ataupun migrasi orang Bugis ke tanah Melayu juga terbagi dalam tiga tahap berdasarkan dari beberapa bukti yang ada saat ini. Gelombang pertama yakni pra kolonialisme, era di mana Eropa masuk ke Nusantara murni untuk melakukan perdagangan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara masih tumbuh sebagai kerajaan yang berdaulat sendiri. Kedua era kolonialisme, di mana Belanda mulai melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan menjadikan koloni perdagangan yang tunduk pada kesepakatan yang diajukan oleh Belanda. Ketiga, yakni era post kolonialisme, yaitu sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Periode ini untuk lebih memudahkan dalam melihat faktor pendorong dan penarik pada masing-masing periode perantauan sehingga lebih gampang untuk mengetahui tahapan dan motif perantauan yang dilakukan oleh orang Bugis ke tanah Melayu.

Harus diakui bahwa keberadaan Malaka sebagai pusat perdagangan dunia telah menarik perhatian para pedagang dan pelaut, termasuk oleh orang Bugis. Kesempatan demikian tentu tidak dibiarkan berlalu begitu saja karena orang Bugis termasuk orang-orang yang sangat mengenal laut dan memiliki semangat berlayar (*sompe'*) dan pekerja keras. Berbekal pengetahuan pelayaran, baik sistem navigasi, astronomi, ataupun pola kerjasama yang saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, telah membuat mereka melanglang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Tidak heran, bila mereka terkadang memiliki suatu tempat persinggahan untuk tinggal sementara selama perantauan itu. Meski demikian, jumlah mereka tidaklah banyak walaupun sudah berkumpul dalam satu kampung pemukiman dan telah pula berbaur dengan masyarakat setempat. Alhasil, tapak-tapak mereka pun tidak tertinggal karena orang Bugis dalam kategori perantauan ini tidak meninggalkan jejak mereka. Justru mereka yang beradaptasi dengan kebudayaan setempat. Hal ini juga tidak banyak memberikan gambaran tentang peninggalan mereka di setiap daerah perantauan, termasuk juga di tanah Melayu.

Beberapa hal yang membuat mereka bisa berdiam sementara di suatu kampung di daerah rantau ialah karena faktor cuaca dan juga menunggu barang-barang dagang. Sebagai pelayar, tidak menutup kemungkinan para anak buak kapal juga melakukan kontak dengan masyarakat sekitar dan membaur menjadi satu. Pada perantauan era ini belum terlacak siapa saja orang-orang Bugis yang tercatat dalam sejarah Tanah Melayu. Tetapi, kemampuan mereka dalam membuat kapal serta kemampuan berlayar, tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang merantau ke tanah Melayu sebagai pembuat kapal ataupun bekerja sebagai tukang reparasi kapal. Beberapa orang Bugis sendiri tentu membutuhkan tukang yang bisa memperbaiki kapal-kapal mereka yang rusak selama perjalanan atau untuk perawatan rutin. Bagi orang Bugis, beradaptasi di tanah rantau merupakan bagian penting dengan berpegang pada pepatah "*kegisi monro sore'lopie, ko situ to-mallabu sengereng*," yakni di mana perahu sampai, di sana kehidupan ditegakan. Dan hal ini juga sangat memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pernikahan dengan masyarakat setempat serta tidak sedikit pula yang justru memboyong keluarga mereka untuk



mendukung usaha selama dalam perantauan. Kenyataan ini dapat di lihat dari beberapa pemukiman penduduk Bugis pada abad ke-16 yang mulai mendapatkan tempat tersendiri di beberapa kota atau di beberapa pulau yang berada di sekitar Bintan dan Johor. Pola seperti ini sama halnya terjadi pada masyarakat perantauan Bugis di Banten dan Batavia (kini Jakarta) yang didominasi oleh para saudagar dan konglomerat. Keadaan ini juga diperkuat dengan adanya perpindahan penduduk yang disebabkan terjadinya perubahan kota karena peperangan antara kerajaan dan juga berpindahnya pelabuhan sebagai pusat perdagangan atau bandar perdagangan. Sebagaimana tercatat dalam historiografi kerajaan Melayu, pusat kerajaan pasca Malaka dikuasai oleh Portugis selalu berpindah-pindah antara Johor dan Riau. Kala itu, Tamasik—kini Singapura—masih berperan sebagai tempat transit bagi para pedagang dan juga kapal-kapal yang mengangkut barang dagangan. Pusat perdagangan internasional ialah Malaka yang menjadi penghubung perdagangan ke Eropa. Sedangkan para pedagang kemungkinan lebih banyak hidup sekitar pelabuhan-pelabuhan kecil seperti di Tamasik dan Bentan, daripada pelabuhan di Malaka. Bahkan,

Bintan sendiri telah beberapa kali mengalami pasang surut pertumbuhannya yang membuat penduduk datang dan pergi.

### **B. Lima Opu, Saudagar yang Bangsawan**

Kehadiran Portugis di Malaka pada 1511 M telah membuat resah sebagai besar kerajaan di Nusantara. Bahkan, beberapa kali Malaka meminta bantuan untuk menyerang Portugis di pusat perdagangan internasional itu kepada kerajaan-kerajaan besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan juga Sulawesi. Pertempuran panjang bertahun-tahun itu akhirnya membuat Malaka tak berdaya dan sang raja terpaksa memindahkan pusat kerajaan ke Johor. Portugis menjadi penguasa baru di Melaka walaupun masih sering mendapatkan serangan dari beberapa kerajaan terutama, kerajaan Aceh. Tetapi, kehadiran Portugis itu telah mampu menarik kedatangan bangsa Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol dan Belanda. Mereka datang untuk mendapatkan rempah-rempah dan sumber daya alam dari kekayaan Nusantara sekaligus juga mendapatkan barang-barang produksi Tiongkok. Mereka juga berusaha saling mendapatkan perhatian kerajaan lokal demi bersaing mendapatkan daerah-daerah koloni. Pelan tapi pasti, kolonilis

Eropa ini mampu menekan kerajaan-kerajaan lokal setelah terlebih dahulu ditaklukan.

Belanda melalui perusahaan dagangnya, VOC, terus melakukan penekanan kepada beberapa kerajaan lokal. Mereka tidak lagi menggunakan pendekatan persuasif sebagaimana hendak ditunjukkan pada awal kehadiran mereka, melainkan juga tidak kalah frontal seperti yang dilakukan oleh Portugis. Tak pelak, beberapa kerajaan lokal terpaksa harus menyerah setelah ditaklukan oleh pasukan dari kompeni Belanda. Keadaan seperti ini juga terjadi di kerajaan Gowa Makassar yang ketika itu menjadi imperium di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini bisa ditenggerai dari perjanjian Bungaya pada 1667 yang dibuat oleh VOC dengan kerajaan Gowa usai perang sengit selama hampir dua tahun yang kemudian dimenangkan oleh Belanda. Para pembesar kerajaan terpaksa melakukan perjanjian tersebut karena tega melihat korban terus berjatuh di pihaknya.

Akibatnya, sebagian masyarakat dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan bermigrasi ke beberapa daerah. Dari sinilah kemudian terjadi diaspora masyarakat Bugis ke berbagai wilayah di Nusantara. Di antara mereka ada yang bermigrasi ke Batavia, Kutai, dan

Johor-Riau-Lingga. Alasan perpindahan mereka ini karena ketidaksetujuan terhadap perjanjian Bugaya yang dilakukan antara Kerajaan Wajo dan pihak VOC. Mereka menilai, perjanjian tersebut sebagai pengakuan kekalahan terhadap Belanda yang artinya mereka bukan lagi sebuah kerajaan yang merdeka dalam menjalankan pemerintahan serta kehidupan lainnya. Bagi mereka, campur tangan Belanda tersebut justru akan memperkeruh suasana politik, sosial, dan ekonomi. Maka tidak heran bila para pembesar kerajaan melakukan eksodus dan migrasi ke berbagai daerah bersama dengan keluarga besar. Periode kedua perantauan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor politik.

Dalam perjanjian Bungaya itu, mereka tidak dilarang untuk meninggalkan Sulawesi Selatan menuju beberapa daerah yang masih dalam kekuasaan Belanda, seperti ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tetapi mereka dilarang berhubungan dengan kerajaan Bima di Flores dan kerajaan Ternate di Maluku. Maka wajarlah bila kemudian di antara mereka ada yang merantau ke tanah Melayu dan Sumatera.<sup>25</sup>Malaka yang sudah masyhur itu pun banyak di datangi oleh perantauan dari

---

<sup>25</sup>Faisal Sofyan, *Sejarah Persemendaan Melayu dan Bugis*, Tanjungpinang: Milaz Grafika, 2014, hlm. 13-41

Bugis dan juga dari Tiongkok, India, dan Jawa. Dalam catatan Gubernur Belanda Balthasar Bort pada 1678 M, di pusat bandar Malaka terdapat sekitar 4884 orang. Dalam laporan itu disinggung juga orang Bugis yang menempati 38 rumah atap. Mereka terdiri 38 laki-laki dewasa dan 24 perempuan dewasa, serta 40 anak-anak, 14 abdi laki-laki, 9 abdi perempuan dan tidak ada abdi anak-anak.<sup>26</sup>Data tersebut menunjukkan perantauan Bugis telah mengambil tempatnya tersendiri di bandar pelabuhan internasional itu. Bisa jadi, mereka adalah para saudagar yang memilih menetap sementara atau permanen di Malaka dan juga kelas menengah yang sengaja hadir di sana untuk membantu mengurus keperluan para sudagar dan pelaut dari Bugis yang beresandar di pelabuhan Malaka. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan kondisi serupa terjadi di beberapa daerah lainnya di semenanjung Malaya dan juga kepulauan di dekatnya, seperti di Bintan, Temasik, dan Johor.

Dalam sejarah, orang Bugis perantauan di tanah Melayu paling terkenal ialah Opu Daeng Rilakka bersama dengan lima orang puteranya. Ia merupakan

---

<sup>26</sup>Dikutip dari Victor Pursell, *Orang-orang Cina di Tanah Melayu*, terjemah Nik Hasna Nik Mahmood, Johor: Universiti Teknologi Malaya, 1997, hlm.33

seorang bangsawan putera seorang raja Bugis yang merantau karena tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Ketika keluar dari tanah Bugis, Opu Daeng Rilakka menuju ke Batavia. Di sana, ia bertemu dengan saudaranya, Daeng Biyasa, yang telah lebih dahulu merantau dan menjadi seorang saudagar. Ia menetap di Batavia kurang lebih selama tiga bulan lalu melanjutkan pelayaran ke Siantan (saat ini masuk Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau). Perjalanan tersebut merupakan perjalanan panjang layaknya perjalanan dari Makassar ke Batavia.

Setibanya di Siantan, Opu Daeng Rilakka menemui seorang nakhoda yang masyhur dikenal Nahkoda Alang. Ia berasal dari Bugis dengan nama Qori Abdul Karim atau Karaeng Abdul Karim.<sup>27</sup> Artinya, sebelum perantauan Daeng Rilakka bersama lima orang puteranya, ada orang Bugis yang telah terlebih dahulu menetap di tanah Melayu. Karaeng Abdul Karim ini adalah seorang nakhoda dan juga saudagar yang melayani

---

<sup>27</sup>Dalam beberapa sumber ia disebut dengan Karaeng Abdul Karim. Namun tidak sedikit yang mengatakan ia adalah seorang nakhoda dan saudagar dari Bugis. Dalam versi cerita rakyat lainnya, ada yang menyebutkan ia adalah nakhoda kerajaan Johor yang membelot dan menjadi lanun atau parompok yang justru tewas di tangan orang Bugis yang diperintahkan sultan untuk memberantas lanun-lanun dari negeri Siam, Campa dan Kamboja. Menurut penulis, kemungkinan hikayat yang paling kuat ialah sebagaimana yang di bahas ini.

pelayaran dan perdagangan di sekitar laut China Selatan dan juga ke kepulauan Batam dan Bintan. Tidak ada sumber yang menyebutkan secara pasti kapan ia mulai menetap di Siantan dan berapa orang Bugis yang berada di sana. Meski demikian, keberadaan Karaeng Abdul Karim menunjukkan tradisi perantauan orang Bugis pada masa-masa sebelumnya. Dapat diperkirakan ia adalah orang yang lebih dahulu merantau sejak melutusnya perang Makassar—sebelum perjanjian Bungaya—dan ia bukan satu-satunya orang Bugis karena sebagai nahkhoda tentu ia juga memiliki anak buah kapal yang sama-sama berasal dari Bugis. Kemungkinan Karaeng Abdul Karim kenal dengan Daeng Biyasa dan atau juga dengan Daeng Rilakka karena tidak mungkin perjalanan Daeng Rilakka ke Siantan tanpa tujuan sebab daerah tersebut merupakan daerah yang jauh dari pusat perdagangan di Malaka, Temasik, dan Bintan. Apalagi, tidak lama setelah pertemuan, keduanya menjodohkan masing-masing anak mereka.

Fakta mengenai Daeng Rilakka ke Batavia terlebih dahulu bisa diinterpretasikan bahwa ia bersilaturahmi kepada saudaranya sekaligus meminta petunjuk perantauan yang lebih bisa menguntungkan selain di Ba-

tavia. Tidak menutup kemungkinan pula, Daeng Rilakka meminta modal—atau Daeng Biyasa memberikan modal tambahan—untuk berdagang di negeri rantau karena Daeng Rilakka membawa serta seluruh anggota keluarganya, termasuk lima orang anaknya. Keberangkatan ke Siantan itu juga atas Daeng Biyasa sebab Selat Malaka yang berada di bawah kekuasaan Johor dan Aceh merupakan tempat pertemuan pedagang internasional dan lebih dekat dengan beberapa negeri dari daratan Asia yang kala itu juga sudah cukup terkenal seperti Kamboja dan Champa. Artinya, tujuan awal Daeng Rilakka ke tanah Melayu bukanlah hendak menaklukkan Johor melainkan untuk berdagang, sebagaimana dengan kebanyakan orang-orang perantau dari Bugis lainnya kala itu. Kedua pun beremitra dalam perdagangan dengan armada yang dimiliki oleh Nahkoda Alang dan modal tambahan dari Opu Daeng Rilakka.

Kisah-kisah tentang Nahkoda Alang dan Daeng Rilakka beserta lima orang anaknya itu membuat banyak kerajaan ingin meminta bantuan mereka. Hal itu tidak lepas dari ketangguhan mereka melawan para perompak selama perjalanan berdagang ke Johor, Siam, Campa dan Kamboja. Dalam suatu kisah disebutkan,



bahwa Nahkoda Alang termasuk pedagang yang sering kehilangan dagangan karena parompok sehingga rute perdagangannya lebih banyak hanya Siantan dan Bintan saja yang relatif lebih aman. Sejak kehadiran Opu Daeng Rilakka, ia melakukan ekspansi bisnis ke luar daerah. Tak pelak, perampokan masih terjadi. Mereka bisa berhasil selamat dan memenangkan perlawanan dengan perampok karena kehebatan Opu Daeng Rilakka dan lima orang anaknya. Nama-nama mereka pun mulai terkenal sehingga membuat para pembesar kerajaan Johor dan kerajaan di Pontianak meminta bantuan mereka dalam setiap ada peperangan. Hal inilah cikal bakal lima anak Opu Daeng Rilakka itu yang kelak menjadi bangsawan di Riau, Semenanjung Malaya dan Kalimantan Barat—bagian ini akan dijelaskan tersendiri. Kekuatan pasukan Opu Daeng lima bersaudara terus bertambah yang kemungkinan besar juga dari keturanan orang Bugis yang turut menjadi pasukan atau bawahan mereka. Sebab, dalam setiap membantu kerajaan-kerajaan itu, mereka tidaklah membawa satu kapal saja, melainkan beberapa kapal dan bahkan sebagian ada menyebut jumlahnya mencapai puluhan kapal. Apakah selain mereka ada perantauan dari Bugis lain-

nya ketika itu? Ada. Yaitu kelompok orang-orang Bugis yang tinggal di bagian Barat pulau Bintan. Memang tidak ada kejelesan perihal keberadaan mereka selayaknya perjalanan Daeng Rilakka. Bisa jadi sebagian dari mereka menetap di Johor, Singapura, Batam, ataupun Karimun. Mereka adalah Daeng Matekko dan para pengikutnya yang membela Raja Kecil yang mendirikan kerajaan Siak usai dipukul mundur dari tahta kerajaan Johor oleh pasukan kelompok pro Raja Sulaiman dan lima anak dari Opu Daeng Rilakka. Artinya, kedua belah pihak sama-sama disokong kekuatan Bugis. Pertempuran kedua belah pihak berlangsung di sekitar perairan Tamasik selama hampir 10 hari yang berakhir dengan kemenangan pihak Raja Sulaiman dan Opu Daeng lima bersaudara.

Artinya, Daeng Matekko juga adalah perantau di tanah Melayu. Ia adalah saudara dari La Maddukelleng Arung Singkang Sultan Pasir sehingga ia termasuk keturunan bangsawan. Daeng Matekko telah menjadi saudagar di wilayah kerajaan Johor. Dan tidak menutup kemungkinan, ia juga cukup kenal dengan Nahkoda Alang dari Siantan yang juga keturunan Bugis. Selayaknya orang di perantauan dengan nilai budaya *passe*

atau solidaritas, terdapat jaringan sudagar-saudagar Bugis yang bertebaran di wilayah kekuasaan Johor-Riau sehingga dapat diduga mereka biasa saling berkomunikasi satu sama lain. Sebelum meletus perang, Opu Daeng lima bersaudara sudah terjadi komunikasi dengan komunitas-komunitas Bugis yang ada di kerajaan Johor dan sekitarnya, termasuk dengan Daeng Matekko untuk mendukung Raja Sulaiman dan menumbangkan kekuasaan Raja Kecil. Namun, komunikasi itu gagal dan membuat keduanya bersebarangan, Daeng Matekko bersama pengikutnya yang terdiri dari beberapa pelaut-pelaut tangguh Wajo, justru membela Raja Kecil.<sup>28</sup> Setelah kalah peperangan tersebut, para pendukung Daeng Matekko mengikuti Raja Kecil ke Kuatan membangun kerajaan Siak. Di sinilah mereka menetap dan tumbuh bersama masyarakat Melayu daratan Sumatera dan juga menjadi bagian dari kekuatan kerajaan Siak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Menurut Wahyudin Hamid, kedua pihak itu tidak satu suara prihal dukungan dalam kemelut kekuasaan di Johor karena latar belakang historis. Opu Daeng lima bersaudara merupakan keturunan Bugis sedangkan Daeng Matekko adalah keturunan Wajo yang turut membantu Gowa dalam penaklukan kerajaan Bugis kala itu. Lihat Wahyuddin Hamid, *Pasoppe Bugis Makassar II*, Jakarta Telaga Zaman, 2005, hlm. 36

<sup>29</sup>Hal ini belum terlalu mendapatkan banyak kajian sebab di kalangan Johor dan Riau, Raja Kecil termasuk orang mencederai sejarah Johor. Ia pun termasuk orang kalah yang dalam penulisan sejarah memang sering tidak

Meski terjadi peperangan dari kedua belah pihak, tetapi tidak menyurutkan minat orang untuk mendatangi tanah Melayu. Malaka masih tetap menjadi pusat perdagangan dengan kehadiran kantor-kantor perdagangan dan perwakilan dari negara-negara kolonialis Eropa. Dalam teori perkembangan kota, biasanya daerah-daerah penyanggah di sekitarnya juga turut tumbuh subur, seperti Tanjungpinang di Riau, Tumasik dan Johor. Dan sejak itu pula, secara perlahan kerajaan Johor-Riau mulai kembali berbenah dan membangun negeri. Silih berganti antara Johor dan Riau menjadi pusat pemerintahan sehingga kedua daerah itu juga menjadi tujuan para perantau. Setiap kali perpindahan pusat kerajaan berdampak pada keberadaan penduduk sebab bermukim di dekat pusat pemerintahan disinyalir lebih aman dari gangguan para penjahat sehingga memicu orang berdatangan dan membangun pemukiman di sekitarnya.

Sudah jamak diketahui bahwa perantauan mengadu nasib agar lebih baik dan kota-kota besar, apalagi pusat kerajaan, selalu menjadi magnet penarik keha-

---

mendapatkan tempat yang layak. Bahkan dari beberapa kajian sejarah antara Kerajaan Siak dan Johor-Riau tampak beberapa perbedaan yang mencolok. Seakan ada “keberpihakan” dalam menginterpretasikan fakta sejarah.

diran mereka. Ketika itu Riau yang menjadi ibukota kerajaan Johor-Riau tumbuh menjadi daerah padat penduduk dan mulai tumbuh pula perkampungan-perkampungan dengan penduduk yang penyokong kebutuhan masyarakat, seperti bertani, nelayan, dan pedagangan. Riau menjadi pusat perdagangan baru sebagai daerah penyanggah dari perdagangan Malaka. Kehadiran para pedagang dari luar daerah karena kebijakan dagang dan bea cukai yang lebih ringan daripada harus bertransaksi di Malaka dengan peraturan ketat dan bea cukai yang tinggi. Maka ramailah para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara yang melakukan transaksi di Riau.

Pada masa itulah tumbuh perkampungan Bugis di Tanjungpinang yang namanya juga kekal hingga saat ini karena banyaknya orang-orang Bugis dan atau keturunan Bugis. Pulau Bayan, yang saat ini masuk dalam wilayah kampung Bugis, kala itu menjadi benteng pertahanan Raja Haji menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda Johor Riau. Sedangkan para aksar kerajaan juga banyak keturunan Bugis ketika turut mendukung Opu Daeng lima bersaudara dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Sehingga bisa dimaklumi bila di pulau

Bayan dan juga kampung Bugis banyak didiami oleh warga Bugis atau keturunan Bugis. Kampung Bugis tersebut, juga menjadi bagian karakter masyarakat perantau yang selalu hidup berdekatan karena ikatan kedae-  
rahan dan untuk menjaga tradisi kebudayaan mereka sembari beradaptasi dengan kebudayaan daerah tem-  
patan.

### **C. Sumpah Setia: Menjadi Melayu**

Kedatangan Raja Kecil, sultan dari kerajaan Siak keturunan Minangkabau, ke kerajaan Johor-Pahang-Riau telah menjadi titik balik bagi sejarah kerajaan mela-  
yu itu. Raja Kecil mengaku sebagai anak dari Sultan Mahmud Syah II, Sultan Johor Pahang yang telah wafat pada 1699, lalu digantikan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Raja Kecil hendak merebut tahta kerajaan dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Dalam pertempuran berbulan-bulan, Raja Kecil berhasil memukul mundur seluruh armada laut kerajaan Johor-Pahang tanpa am-  
pun serta memporakporandakan kekuatan daratnya.

Keberhasilan Raja Kecil<sup>30</sup> menyerang Johor karena mendapatkan dukungan dari sebagian bangsawan di

---

<sup>30</sup>Menurut Raja Syofyan Samad, dukungan yang diberikan oleh masyarakat Suku Laut kepada Raja Kecil karena kecewa terhadap pemerintahan kerajaan Johor yang dinilai tidak memberikan perhatian kepada mereka. Lihat Raja

Johor serta sebagian penduduk di Temasik (Singapura). Mereka percaya bahwa Raja Kecil merupakan keturunan sah dari Sultan Mahmud Syah II yang telah memerintah selama 14 tahun (1685-1699). Pertempuran itu bukanlah perang yang mudah bagi kedua belah pihak. Saudara dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV yang memimpin pasukan pertahanan kerajaan, Tun Mahmud, telah gigih berjuang menghalangi pasukan Raja Kecil memasuki wilayah Johor. Ia juga sempat terpu-  
kul mundur dan memindahkan pasukan ke Pancur untuk bertahan dan mengatur strategi perlawanan. Namun, Raja Kecil terus memburunya hingga Tun Mahmud turut meninggal dalam medan pertempuran itu.<sup>31</sup> Pada Maret 1718, Johor telah berhasil ditaklukan sepenuhnya.

Kondisi tersebut membuat Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV tidak memiliki banyak pilihan dan membiarkan jabatan sultan kepada Raja Kecil. Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV pun memilih menetap di Pahang sedangkan Raja Kecil berkuasa. Raja Kecil memang

---

Syofyan Samad, *Negara dan Masyarakat: Studi Penerrasi Negara di Rian Kepulauan Masa Orde baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm.

<sup>31</sup>Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam* (Ahmad Fauzi Basri, penerjemah), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991), hlm. 187-189.

telah menjanjikan jabatan kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV namun hal itu tidak terlalu memberi arti bagi sultan. Sepertinya ia tidak ingin membuat sebagian pendukungnya melawan Raja Kecil untuk meminimalisir korban. Meski demikian, bukan berarti singgasana kerajaan Johor-Pahang-Riau di bawah pemerintahan Raja Kecil tidak mendapatkan perlawanan. Di kalangan awam masih ada warga yang tidak yakin bahwa Raja Kecil adalah keturunan Sultan Mahmud II dan apalagi dari kalangan keluarga dan kerabat Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV yang tidak senang kehadiran Raja Kecil.

Setelah hampir tiga tahun lebih Raja Kecil berkuasa di kerajaan Johor-Pahang, singgasananya mulai di goyang. Isu perihal ketidakabsahannya sebagai pewaris tahta kerajaan mulai menyebar dan terus menyeruak di kalangan masyarakat, pembesar kerajaan, serta para saudagar. Sementara di sisi lain, anak-anak dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV juga melakukan perlawanan. Mereka kerap melakukan pertemuan dengan beberapa kalangan untuk mencari pendukung. Seringkali kedatangan tamu kerajaan juga dimanfaatkan untuk mencari dukungan untuk merebut kembali tampuk kekuasaan



yang telah direbut Raja Kecil. Puncak dari perlawanan itu adalah ketika Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV tewas dibunuh oleh pasukan Raja Kecil dalam perjalanan dari Johor ke Riau.<sup>32</sup> Anak-anak Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV juga marah besar begitu mereka mengetahui kabar tersebut. Mereka akhirnya melakukan pertemuan dengan lima orang pembesar keturunan Bugis yang ketika itu berada di Siantan. Mereka berlima itu ialah Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celak, Daeng Manambo, Daeng Kemasek.<sup>33</sup> Pertemuan tersebut membuahkan kemufakatan berupa bantuan perlawanan terhadap Raja Kecil dengan syarat kalangan Bugis mendapatkan posisi jabatan di kerajaan. Opsi itu pun disepakati lalu mereka mengatur waktu penyerangan yang sesuai sebab kekuatan armada perang Raja Kecil terbilang besar serta tangguh dan loyal.

Akhirnya, Raja Kecil berhasil ditaklukan oleh pasukan yang dipimpin oleh lima orang bersaudara dari Bugis itu dan menarik sisa armada dan pasukannya

---

<sup>32</sup>Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, hlm. 198

<sup>33</sup>Hubungan diplomasi kerajaan Melayu dan Bugis sudah terjalin lama, jauh sebelum masa kerajaan Melayu Islam. Dalam beberapa litelatur sejarah, masyarakat Bugis juga pernah membantu kerajaan Kedah dalam melawan serangan dari kerajaan Tiongkok. Sedangkan lima bangsawan dari Kerajaan Luwu itu berhijrah ke negeri Melayu karena mereka menolak perjanjian Bogaya yang menguntungkan VOC dan Kerajaan Bone. Lihat Raja Syofyan Samad, 2010, *Negara dan Masyarakat*, hlm 99-145

kembali ke kerajaan Siak. Bisa jadi, kekalahan Raja Kecil itu juga disebabkan oleh perbedaan pendapat di kalangan para pasukan, khususnya pasukan dari kalangan Johor, perihal keabsahan status keturunan Sultan Mahmud II sehingga mereka tidak sepenuh hati dalam mempertahankan gempuran.

Sejak saat itu, tampuk kekuasaan kerajaan melayu ini pun kembali pada trah Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Sedangkan yang meneruskan tahta kerajaan itu ialah puteranya yang bergelar Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Penobatannya dilakukan oleh para pembesar Bugis dan juga para timbalan pejabat dari Pahang dan Terengganu yang juga masih memiliki hubungan persaudaraan. Hubungan keduanya diikat dengan sumpah setia Melayu-Bugis. Naskah-naskah klasik memperlihatkan beberapa poin penting dari sumpah setia ini ialah terkait dengan pembagian kekuasaan. Misalnya dalam Kitab Silsilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-rajanya dituliskan perihal kisah perihal sumpah setia yang pertama kali dilakukan.

*"Kemudian berkata Opu-opu yang berlima itu kepada Raja Sulaiman, "adapun yang seperti permintaan Raja Sulaiman kepada saya semua itu, saya terimalah. Akan*

*tetapi hendaklah kita semua ini berjanji dahulu betul-betul." Maka Jawab Raja Sulaiman, "baiklah. Dan khabarkanlah oleh Opu-opu itu boleh saya dengar." Syahdan berkata pula Opu Daeng Perani, "Adapun jika jaya pekerjaan saya semua ini sekali lagi melanggar Siak, maka sebelah Raja Sulaiman menjadi Yamtuan Besar sampailah kepada turun menurunnya, dan saya semuanya menjadi Yamtuan Muda sampailah kepada turun-menurunnya juga, tiada boleh yang lain, Maka boleh pilih saja yang lima beradik ini, mana-mana jua yang disukai oleh orang banyak, maka dianya itulah yang jadi Yamtuan Muda, tiada boleh tiada. Dan lagi pula Yamtuan besar jadi seperti perempuan saja, jika diberinya makan baharulah makan ia. Dan Yamtuan Muda jadi seperti laki-laki. Dan jika datang satu-satu hal atau apa-apa juga bicara, melainkan apa-apa kata Yamtuan Muda." Syahdan sekali perjanjian kita mana-mana yang tersebut itu, tiada boleh diobahkan lagi. Maka boleh kita semua pakai sampai kepada anak cucu cicit turun temurun kita kekalkan selama-lamanya."*

Sumpah setia ini telah membawa Bugis menjadi Melayu seutuhnya karena telah menjadi bagian dari penguasa di kerajaan.<sup>34</sup> Dampaknya, sebagaimana telah disebutkan dalam pada kutipan di atas, bahwa terdapat dua pemimpin, Yamtuan atau Yang Dipertuan Besar

---

<sup>34</sup>Menurut Aswandi Syahri, aturan Setia Bugis Dengan Melayu ditulis sebagai salah upaya untuk membangun legalitas historis raja-raja Bugis dalam struktur baru sebuah pemerintah kerajaan Melayu Johor (cikal bakal Riau-Lingga-Johor-Pahang), yang tergambarkan dalam seluruh narasinya. Lihat Aswandi Syahri, *Manuskrip Aturan Setia Bugis dengan Melayu*, Tanjungpinang Pos Edisi Online, <http://tanjungpinangpos.id/manuskrip-aturan-setia-bugis-dengan-melayu/> (diakses Agustus 2019).

(YDB) yakni sultan itu sendiri dan Yamtuan atau Yang Dipertuan Muda (YDM) yakni dari kalangan Bugis. Sejak itu pula, struktur dan tata pemerintahan di kerajaan Johor-Pahang-Riau berubah dengan dua orang pemimpin, dari pihak keturunan Melayu menduduki posisi sultan dengan gelar Yang Dipertuan Besar (YDB) dan dari kalangan Bugis mengisi jabatan setingkat di bawah sultan dengan gelar Yang Dipertuan Muda (YDM) atau sering disebut juga dengan Raja Muda. Dampak dari kehadiran lima orang Opu Daeng bersaudara membuat sistem politik dan pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau pun mengalami perubahan.<sup>35</sup>

Kehadiran Bugis dalam struktur pemerintahan kerajaan Johor-Pahang-Riau itu telah mempengaruhi struktur pemerintahan pada kerajaan Melayu lain dengan menggunakan istilah yang sama ataupun serupa, yakni Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya hubungan kekerabatan melalui jalinan pernikahan yang dibina

---

<sup>35</sup>Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, hlm. 191. Lihat juga Raja Syofyan Samad, 2010, *Negara dan Masyarakat* hlm. 140 dan D.G.E Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 318-319. Dalam kenyataannya, gesekan antara Bugis dan Melayu juga terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Oleh sebab itu, sumpah setia ini terus diperbaharui hingga sampai tujuh kali. Dan yang terakhir atau ketujuh tersebut yakni Sumpah Setia Melayu-Bugis oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan Yang Dipertuan Muda, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi.

keduanya sebagaimana di Terangganu. Pengaruh struktur baru ini kemudian merembet juga ke beberapa kerajaan di Sumatera, seperti Indragiri, Kampar, dan Siak Indrapura. Walaupun sedikit berbeda, struktur serupa juga diterapkan di beberapa kerajaan di Kalimantan Barat seperti kerajaan Mempawah, Sintang dan Sambas.

Kolaborasi kepemimpinan Melayu dan Bugis menghasilkan sinergi perjuangan yang solid dalam melawan kolonialisme Belanda. Pertempuran dalam perang Riau yang dipimpin Raja Haji bukti konkrit patriotisme dalam membela tanah air.<sup>36</sup> Meski demikian, Belanda selalu berupaya untuk memecah belah kedua suku bangsa yang telah menjadi satu mekipun sering kandas. Diakui atau tidak, konflik kesukuan selalu saja menjadi persoalan berat setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan walaupun darah yang mengalir pada generasi penerus itu tidak lagi murni darah Melayu ataupun darah Bugis. Darah itu telah menjadi satu dan melekat erat menjadi Melayu. Tetapi<sup>37</sup>hembusan adu domba

---

<sup>36</sup>Abdul Malik, dkk., *Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah*, (Lingga: Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri), hlm. 40-47

<sup>37</sup>Jan Van der Putten dan Al Azhar, *Di dalam Berkenalan Persahabatan: Surat-surat Raja Ali Haji kepada Vaon de Wall*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2007), hlm.33

Belanda terus dilakukan sehingga persoalan itu masih terus menjadi polemik.

Dari gambaran di atas, tampak jelas bahwa kehadiran bangsawan Bugis di tanah Melayu karena sosial politik di Sulawesi setelah perjanjian Bungaya. Sedangkan sebab masuk dan hadirnya dalam struktur kekuasaan di kerajaan Melayu karena faktor politik internal kerajaan. Kondisi politik internal kerajaan yang sedang berebut kekuasaan justru mengundang saudagar Bugis untuk turut mengambil peran atau membantu memperebutkan kekuasaan. Padahal awalnya, bangsawan Bugis itu adalah saudagar yang menjalankan pelayaran di sekitar Riau Kepulauan, Malaka hingga ke negeri Siam dengan sejumlah armada dan pasukan untuk bertahan dari para prompak. Karena memiliki armada yang cukup banyak disertai anak buah yang memadai, mereka juga juga dikenal sebagai armada yang ditakuti oleh para perompak di sekitaran selatan Malaka dan Karimata.



## **BAB IV**

### **PENGARUH STRUKTUR FUNGSIONAL SETELAH KEHADIRAN BUGIS**

Sejarah hanya akan menjadi bahan hafalan belaka apabila tidak diinterpretasikan secara tepat untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Sejarah masa lalu menjadi penting agar bisa mendapatkan gambaran yang baik bagi kehidupan di masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini, perubahan-perubahan yang terjadi pascakehadiran Bugis di tanah Melayu pada periode kerajaan Johor Pahang Riau Lingga akan menjadi fokus kajian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari itu, analisa ini tidak lepas dari penggunaan teori-teori sosial, yang dalam penelitian ini menggunakan struktural fungsional.

Dalam teori ini memandang bahwa ada kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial masyarakat. George Ritzer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah “setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendiri-



nya.”<sup>38</sup>Kecendrungan teori ini menitikberatkan pada satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat.

Dari gambaran pada bagian-bagian sebelumnya, mulai tersingkap beberapa perubahan yang terjadi dalam struktur maupun fungsi dalam kerajaan dan masyarakat Melayu itu sendiri. Kehadiran bangsawan Bugis bersama dengan para pekerjanya itu telah memberikan dampak terhadap situasi dan kondisi, sosial dan budaya, serta ekonomi dan politik yang ada di dalam kerajaan Melayu itu. Bagian ini akan mengeksplorasi bagian-bagian yang menjadi dampak atas kehadiran Bugis di tanah Melayu.

### **A. Struktur dan Wajah Baru Kekuasaan**

Kekuasaan dalam tradisi Melayu memiliki jenjang struktur yang dinamis dan bersifat natural menyerupai

---

<sup>38</sup>George Ritzer dan Gouglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.118.

organisme kehidupan. Dalam beberapa karya klasik Melayu, disebutkan tentang konsep kekuasaan yang menjadi idaman. Seperti dalam karya Raja Ali Kelana, *Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, disebutkan bahwa sebuah kerajaan yang merdeka ibaratkan seorang manusia.

*Bermula adalah kerajaan itu dapat dibangsakan dengan seorang manusia yang akil, balig, merdeka, sejahtera daripada penyakit yang memberi mudharat pada tubuhnya. Dan ialah juga dinamakan ('alam shugra). Telah berkata oleh yang berkata, "maka apabila cedera oleh satu anggota daripada segala anggota akan sesuatu daripada wadhifahnyanya, niscaya cedera aturan tubuh. Dan berseru-seruanlah oleh bina-binaannya kepada penyakit yang memakan diri dan rusak." Dan seumpama yang demikian mamlakah, istimewa lagi kepala mamlakah itu.*<sup>39</sup>

Kepala *mamlakah* yang berarti sultan, imam, khalifah, amir, dan raja, adalah penguasa tertinggi dalam sebuah kerajaan. Kekuasaan kerap kali diidentikkan dengan dirinya dalam sistem monarki karena kekuasaan bersifat turun temurun. Keistimewaan sebagai penguasa ialah karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi tersebut. Ia merupakan orang yang terpilih saja yang bisa mendudukinya,

---

<sup>39</sup> Raja Ali, *Kumpulan Ringkas*, hlm. 4

baik karena nasabnya ataupun karena suatu kesepakatan bersama untuk memilihnya. Dalam fenomena kekuasaan di Johor-Pahang-Riau-Lingga, kekuasaan memang bersifat keturunan, tetapi mengalami perubahan ketika masuknya keturunan Bugis dalam struktur kekuasaan sebagai bentuk kesepakatan di antara keduanya. Kekuasaan itu terbangun dari sumpah setia di kalangan elite untuk menegakkan kekuasaan yang menjaga seluruh wilayah dan rakyatnya.

Kekuasaan ini terkait juga dengan perangkat pendukungnya. Dalam beberapa naskah melayu disebutkan struktur ideal sebuah pemerintahan itu meliputi menteri koordinator. Misalnya yang terdapat dalam Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas yang berbunyi:

*“Dan raja itu tiada mengeluarkan titah perintah melainkan dengan pertolongan dan kekuatan dua bentaranya yaitu (kanan dan kiri) ialah (ilmu dan akal). Dan telah tetap titah perintah itu maka ditanggihkan pula diatas empat orang (wuzara yang dakhiliyah) menteri dalam karena menambah bagi kekuatan dan perdirian muwafaqot atas kelakuan yang satu ialah (mata, telinga, hidung, mulut) dan daripada menteri dalam itu tersuruh titah perintah kepada empat (wuzara yang kharijiyah) menteri luar ialah (tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri) pada menjalankan dan menanggungkan titah perintah itu atas dua puluh (umara’) amir-amir yang menjaga para segenap anak sungai, teluk, tanjung, tokong, pulau ialah segala (anak-anak*

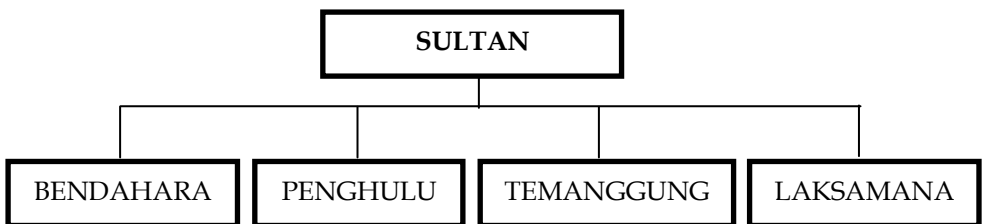
*jari) dan dari padanya segala amir-amir tersiarlah titah perintah itu atas segala juru batin, penghulu, ketua, dan lain-lainnya yang empat puluh delapan ialah segala (ruasan-ruasan anak jari) dan daripadanya terbahagikan pula titah perintah itu kepada masing-masing anak buah yang di dalam pegangannya (rakyat sakai) ialah tulang, aurat, daging, darah, kulit, bulu, roma, dan lainnya.”<sup>40</sup>*

Aparat pemerintah sebagai perlengkapan dalam kekuasaan memiliki peran berjenjang. Beberapa di antaranya bertugas menasehati atau memberikan pertimbangan setiap kebijakan dan lainnya bertugas melaksanakan kebijakan tersebut. Bagian yang kedua membutuhkan jumlah aparatur yang banyak sesuai dengan luas wilayah kerajaan hingga tingkat yang paling terendah. Mereka adalah ujung tombak dari kekuasaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berdasarkan daerahnya dan memiliki garis koordinasi. Hirarki kekuasaan tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan kekuasaan. Artinya, menjalankan kekuasaan tidak bisa dilakukan seorang diri, melainkan membutuhkan perangkat untuk bisa mencapai cita-cita bersama. Dalam praktiknya pada kekuasaan di kerajaan Johor-Pahang-Riau, struk-

---

<sup>40</sup> Raja Ali Kelana, *Kumpulan Ringkas*, hlm. 8

tur kekuasaan mengikuti struktur lama sejak era imperium Malaka. Sultan dibantu oleh beberapa perangkat aparaturnya yang terdiri daripada Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Sistem ini dikenal juga dengan sistem empat belipat, yakni di bawah empat orang penting tersebut terdapat delapan aparatur yang membantunya dan di bawah masing-masing dari yang delapan orang ini terdapat enam belas orang pembantu lainnya. Berikut adalah skema umum tentang struktur kekuasaan kerajaan Johor-Pahang-Riau.



Struktur kekuasaan seperti di atas ini berlaku kerajaan Melayu Islam dari imperium Malaka hingga era pemerintahan di Johor. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Datuk bendahara bertugas sebagai menteri utama yang memberikan penasihat raja dalam bidang pentadbiran. Ia juga menjadi ketua hakim dan angkatan

perang di darat. Yang tidak kalah penting, posisi bendahara adalah sebagai pelaksana tugas sultan ketika sultan sedang sakit atau berada dalam perjalanan ke luar negeri. Sedangkan tugas pengulu atau disebut juga penghulu bendahara ialah mengurus sumber pemasukan dan pengeluaran negara, yakni berhubungan dengan pajak, upeti, pajak pelabuhan. Posisi yang melekat padanya ialah ketua bagi semua bendahari, ketua urusan istana dan ketua semua syahbandar. Sementara posisi temanggung ialah penjaga keamanan dalam negeri dan penegak peraturan perundang-undangan. Jabatan yang melekat padanya ialah sebagai ketua polisi, ketua protokoler istana, dan bertugas juga sebagai hakim di darat. Adapun posisi Laksamana bertugas sebagai penjaga keamanan laut. Posisi komando yang berhubungan dengan laut berada di bawah koordinasinya, termasuk memastikan keamanan perjalanan sultan di laut. Ia juga menjadi duta bagi sultan untuk urusan luar negeri.

Struktur ini berubah sejak terjadinya pembagian kekuasaan antar Melayu dan Bugis di era pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sebagai hasil sebuah kesepakatan atas kerjasama yang dijalin dalam merebut

singgasana kerajaan dari Raja Kecil. Ketika itu, Daeng Rilekka dengan anak-anaknya yang lima itu menerima tawaran untuk membantu pihak Sultan Sulaiman mengambil kekuasaan direbut oleh Raja Kecil usai membunuh Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Ketika perjuangan itu membuahkan hasil, maka perjanjian itu pun dilaksanakan tanpa bisa ditolak oleh Sultan Sulaiman. Kemudian mereka berbagi kekuasaan dengan gelar Yang Dipertuan Besar (YDB) untuk sultan dari pihak Melayu dan Yang Dipertuan Muda (YDM) dari pihak Bugis.

Dalam naskah Melayu disebutkan, kedua orang penting ini juga disebutkan menggunakan gelar sultan, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah tetap menyandang gelarnya sedangkan dari pihak Bugis, yakni Opu Daeng Celak bergelar Sultan Alaudin Syah. Hal itu termaktub dalam naskah sumpah setia Bugis dengan Melayu sebagaimana dikutip oleh Aswandi Syahri,<sup>41</sup>

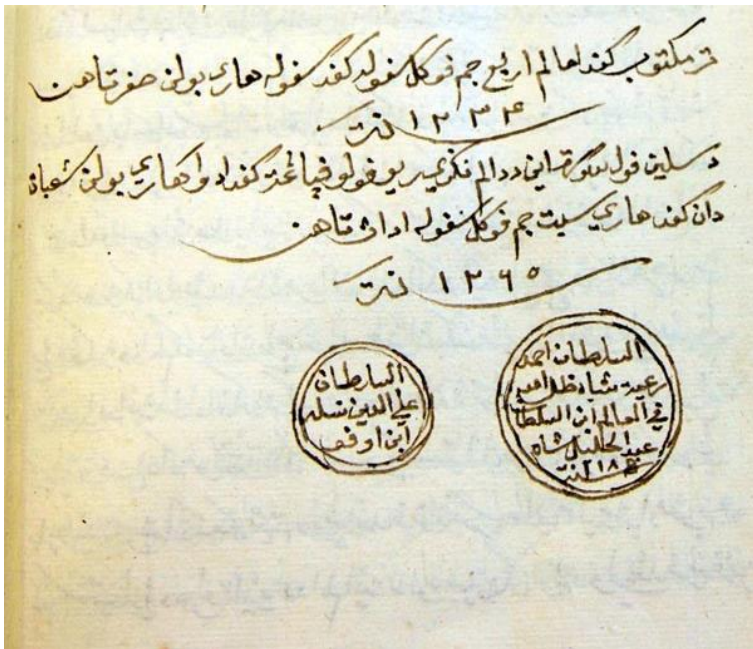
*“...Kepada Hijrah seribu seratus empat puluh satu tahun dan tahun Zai, maka digantikan oleh Yang Dipertuan saudara Baginda yang bernama Daeng Pali (Daeng Celak)itu jadi Raja Muda, maka bergelar Sultan Alaudin juga. Maka dibaharui juga sumpah setia itu oleh Duli Yang Dupertuan Muda itu dengan Da-*

---

<sup>41</sup>Aswandi Syahri, *Naskah Aturan Setia Bugis dengan Melayu*.

*tuk Bendahara dengan Engku Busu, dan segala orang besar-besar...bersumpah setia muafakat tiadalah berubah-ubah...".*

Dalam sebuah manuskrip yang ditampilkan oleh Aswandi itu juga terlihat dua salinan cap di bagian akhir naskah atau surat Sumpah Setia Bugis dengan Melayu.



Salinan naskah Sumpah Setia Bugis Melayu direpro dari laman web Tanjungpinang Pos.

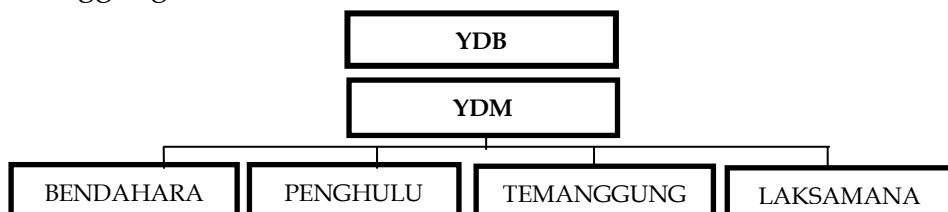
Pada manuskrip di atas yang ditulis ulangan terdapat dua repro bentuk stempel dari dua orang, yakni yang ukuran besar bertuliskan Sultan Ahmad Riayat Syah dan lingkaran kecil bertuliskan Sultan Aliudin



Syah. Artinya ada dua matahari dalam satu kerajaan, namun dengan posisi yang berbeda. YDB atau sultan memerintah kerajaan dan daerah taklukannya secara umum dan sekaligus sebagai simbol kerajaan, sedangkan YDM adalah pelaksana pemerintahan, termasuk urusan dalam negeri dan urusan luar negeri. Hal ini sangat berbeda sekali dengan struktur atau hirarki kekuasaan pada era sebelumnya.

Dalam narasi di kitab Silsilan Belayu Bugis, misalnya, terdapat gambaran tentang bagaimana peran dan tugas yang diembano leh pihak Bugis dengan posisinya sebagai YDM sebagai berikut, *“Dan lagi pula Yamtuan besar jadi seperti perempuan saja, jika diberinya makan baha-rulah makan ia. Dan Yamtuan Muda jadi seperti laki-laki. Dan jika datang satu-satu hal atau apa-apa juga bicara, melainkan apa-apa kata Yamtuan Muda.”* Syahdan sekali per-janjian kita mana-mana yang tersebut itu, tiada boleh diobah-kan lagi. Maka boleh kita semua pakai sampai kepada anak cucu cicit turun temurun kita kekalkan selama-lamanya.” Artinya, pelaksana dari kerajaan ini sebanarnya adalah dari orang Bugis. Menurut Andaya, kedukan (YDM) dalam struktur baru di kerajaan Melayu ini menyamai kedudukan dalam kerajaan Bone di Sulawesi Selatan. Ia

diistilahkan sebagai *Tomarilaleng*. Dalam kerajaan Bone, *Tomari-laleng* tidak pernah menjadi pewaris takhta kerajaan, tetapi berkuasa untuk menangani seluruh urusan rasmi dan urusan penting. Malahan dalam kerajaan ia sangat dekat dengan penguasa atau raja. *Tomarilaleng Lolo* dan *Tomarilaleng Toa* merupakan penasihat atau menteri yang mempunyai hubungan akrab dengan raja. Model jawatan inilah yang dijadikan paksi kepada jawatan Yang Dipertuan Muda dan Raja Tua yang menjadi dambaan Opu Bugis Lima Bersaudara dalam kerajaan Melayu.<sup>42</sup>Dalam historigrafi Riau, setelah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah mangkat, posisi sultan diteruskan oleh anak-anaknya. Tetapi, ketika anak-anak itu diangkat, usia mereka masih di bawah lima tahun. Dengan demikian, maka pemegang penuh kekuasaan itu adalah YDM di bantu oleh pemangku kekuasaan lainnya, yakni bendahara, penghulu bendahari, temanggung dan laksamana.



<sup>42</sup>Leonard Y. Andaya. (2010). *Diaspora Bugis, Identitas dan Islam di Negeri Melayu*, dalam *Diaspora Bugis Di Alam Melayu*. Ininnawa, Makassar, hlm. 22.

Struktur baru ini juga terus dipertahankan hingga kerajaan terpisah menjadi dua bagian akibat politik adudomba Inggris dan Belanda yang telah menyepakati pembagian daerah jajahan dalam kesepakatan yang dikenal dengan Traktat London 1812 itu. Dampaknya, dua saudara Tengku Husen dan Tengku Abdurrahman masing-masing meneruskan tahta kerajaan di dua wilayah terpisah. Tengku Husen menjadi sultan di Johor-Pahang dan dan Tengku Abdurrahman menjadi Sultan di Lingga-Riau. Sejak saat itulah, dua kerajaan ini terpisah walaupun masih dari trah yang sama. Keduanya juga mengalami perbedaan dalam struktur kekuasaan dan menjalankan masing-masing.

Gambaran di atas telah tampak jelas bahwa masuknya Bugis di ranah struktur kekuasaan di kerajaan Johor-Pahang-Riau hendak mempertegas posisinya sebagai aktor perubahan di kerajaan ini. Bugis hendak menjaga keseimbangan situasi sebagai dampak dari kontrak atau kesepakatan yang telah disetujui ketika hendak menyerang Raja Kecil. Hal ini tidak bisa ditolak oleh pihak melayu karena secara kekuatan politik, mereka tidak cukup kuat, secara kekuatan armada juga tidak memadai karena tidak semua suku laut di Melayu

kompak mendukung kelompok Sultan Sulaiman. Kenyataan dalam sejarah menyiratkan bahwa upaya Bugis menjadi aktor dalam kerajaan melayu menuai sukses. Apalagi dengan cara pembagian kekuasaan—yang menjadikan YDM sebagai pelaksana pemerintahan dan hubungan luar negerinya—telah membuat posisi Bugis semakin menjadi aktor penting dalam sejarah kerajaan Melayu ini.

Penguatan posisi Bugis dalam struktur kerajaan juga sebagai bentuk adaptasi mereka di tanah Melayu. Adaptasi (*adaptation*) sudah menjadi suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam perspektif Talcott Persons, apabila telah beradaptasi, maka selanjutnya perlu mengubahnya ke dalam fasilitas yang bisa digunakan, dan kemudian mendistribusikan ke bagian lain sistem. Intinya, aktor harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan lingkungannya. Jikalau Bugis tidak menagih janji dari kesepakatan dengan pihak Sultan Sulaiman, maka peluang Bugis untuk menjadi bagian dari Melayu seutuhnya akan sulit terwujud, apalagi menjadi aktor struktural dan fungsional sekaligus. Menjadi Melayu adalah bagian dari pencapaian tujuan (*goal attainment*)

Bugis. Maka, tidak heranlah bila tindakan penagihan janji pembagian kekuasaan itu dilakukan oleh pihak Bugis sebab ia telah mengalokasikan sumber dayanya untuk memperjuangkan kemenangan dari pihak Raja Kecik. Padahal, di pihak Raja Kecik juga terdapat sepasukan Bugis yang dipimpin oleh Daeng Matekko.<sup>43</sup> Dalam kenyataannya, pasukan Daeng Matekko pun akhirnya mengikuti rombongan Raja Kecik ke Siak dan melanjutkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, kelompok Bugis pro Opu Daeng berlima itu menjadi bagian penting dalam struktur kerajaan sekaligus dalam struktur sosial. Beberapa bangsawan Bugis yang sebelumnya hanyalah pendatang biasa, kemudian mendapatkan keistimewaan posisi secara sosial, tanpa menggeser strata sosial dari kalangan Melayu. Jelas, dengan kehadiran struktur baru dalam hirarki kekuasaan ini juga menambah jumlah panjang struktur yang secara tidak langsung juga akan menjadi bagian pentingnya, misalnya posisi calon YDM kemudian di sebut dengan posisi Kelana yang bertugas seperti inspektorat dan sekaligus sebagai pimpinan pada kementerian dalam negari.

---

<sup>43</sup>Lihat di bagian sub bab tentang sejarah lima Opu dan peran awalnya sebelum masuk ke struktur kekuasaan kerajaan.

Dengan demikian, beberapa orang perangkat pendukung yang dibawa turut naik status sosialnya mengikuti pembesarnya. Dalam inilah, Opu Daeng yang berlima tersebut menguatkan sistem kekuasaan dan hirarkinya sebagai pondasi menjalankan sistem dalam bentuk integrasi (*integration*) Melayu dan Bugis. Hal penting untuk menjaga agar pihak Bugis dan Melayu tidak melenceng dari sistem yang diharapkan sehingga sirkulasi kekuasaan berjalan secara benar dan efektif. Dalam perspektif Talcott Persons, fungsi integrasi bisa terpenuhi apabila bagian-bagian dalam sistem berfungsi sebagai satu kesatuan. Adanya integrasi Melayu-Bugis ini telah menegaskan bahwa kedua pihak telah menjadi aktor yang akan sama-sama mempengaruhi sistem. Dengan pembagian dan struktur kekuasaan yang baru, keduanya sama-sama memiliki kewenangan untuk menentukan nasib kerajaan. Kolaborasi ini sebagai bentuk integrasi kekuatan politik di kerajaan guna menghadapi dan menangkal serangan dari luar. Sejarah membuktikan bahwa upaya kolonial mempengaruhi sultan atau YDB selalu saja terkendala oleh YDM, ataupun demikian juga sebaliknya. Keunikan dari pengaruh Bugis ini terletak pada pemeliharaan laten (*latent pattern mainte-*

nance) yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan tindakan suatu sistem sesuai aturan norma agar mampu mempertahankan pola dan mengurangi ketegangan dalam unit sistem. Dalam hal ini, penguat dan kunci dari itu semua ialah adanya sumpah setia Bugis dengan Melayu. Bahkan, ketika sumpah setia ini dipraktikan sebanyak tujuh kali dalam sejarah kerajaan sejak masuknya Bugis dalam struktur kerajaan, hal ini justru memperkuat pemeliharaan latensi yang dilakukan pihak Bugis. Sebagian aktor yang memiliki pengaruh secara struktural dan fungsional sekaligus, Bugis memainkan peranannya dengan apik tanpa melanggar norma-norma kemelayuan.

Sejarah telah membuktikan bahwa pengambilan sumpah sultan atau YDB justru harus dilakukan oleh YDM dan disaksikan oleh pembesar kerajaan lainnya, khususnya posisi bendahara, penghulu bendahari, temanggung dan laksamana. Sedangkan prosesi penaballannya menggunakan perangkat dan tradisi yang selama ini digunakan di lingkungan kerajaan Johor-Pahang-Riau. Adat istiadat yang menjadi norma telah dilakukan sesuai dengan tradisinya dan hal ini menjadi penguat bagi pihak Bugis itu sendiri karena bisa bera-

daptasi sekaligus memelihara latensinya untuk mencapai tujuannya menjadi Melayu. Kenyataan ini membuat posisi Bugis tidak tergoyahkan oleh pihak Melayu, meskipun dalam kenyataannya beberapa kali terjadi perang internal untuk meruntuhkan hegemoni Bugis dalam struktur kekuasaan.

Dengan demikian, sumpah setia Bugis dengan Melayu, dalam perspektif struktural fungsional, tak lain adalah upaya adaptasi yang dilakukan oleh Bugis di Tanah Melayu guna mencapai tujuannya. Bahkan, integrasi dan latensi yang diperlihatkan oleh Bugis dalam pengaruhnya semakin memperkuat tentang sebuah prosesnya untuk menjadi Melayu seutuhnya. Ia tidak hanya sekadar menjadi aktor dengan kekuatan struktural saja, melainkan juga memiliki kekuatan fungsional sekaligus. Hal inilah yang membuat Bugis dapat diterima di Tanah Melayu sehingga terjadi proses asimilasi dan akulturasi yang mampu melahirkan fenomena sosial dan kebudayaan baru.

## **B. Perkawinan Sosial Budaya**

Kebudayaan sebagai produk cipta karya masyarakat beranjak dari pemikiran yang menjadi perilaku bersama. Karenanya, budaya dan kebudayaan masyarakat



rakat dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan pemikiran dan perilaku masyarakat itu sendiri. Dua faktor yang paling dikenal dalam kajian antropologi tentang perubahan yakni pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar. Keduanya bisa menghasilkan kebudayaan yang lebih maju dari sebelumnya atau bahkan bisa memundurkannya. Kehadiran orang-orang Bugis di tanah Melayu, mau tak mau, juga akan mengalami perubahan kebudayaan, baik itu karena adaptasi, asimilasi ataupun akulturasi. Orang Bugis dan orang Melayu sama-sama berpotensi saling mempengaruhi.

Umumnya, pendatang akan berupaya beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan setempat. Dalam hal ini, orang Bugis juga memiliki semboyan dalam perantauannya yang berbunyi "*kegisi monro sore'lopie, ko situ tomallabu sengereng*," yakni di mana perahu sampai, di sana kehidupan ditegakan. Maka wajar sajalah bila orang-orang Bugis sangat gampang untuk berbaur dengan masyarakat setempat. Hal ini serupa dengan pepatah yang cukup masyhur, "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Sebagai pendatang, apabila tidak bisa beradaptasi di lingkungannya maka ia tidak akan bisa mencapai tujuannya itu. Dalam konteks pengala-

man bangsawan Bugis, Opu Daeng berlima beserta dengan pengikutnya, mereka telah menjadikan semangat merantaunya tidak hanya sekadar merantau saja, melainkan untuk mencari penghidupan baru di lokasi baru. Sebab itu, perantauan Bugis kala itu bukan perantauan biasanya, melainkan sebuah migrasi untuk mencapai kehidupan baru.

Menjadi perantau yang bisa diterima di tanah rantau, sekaligus masuk dalam struktur masyarakatnya merupakan sebuah proses dalam beradaptasi dengan lingkungan. Jika dalam kekuasaan Bugis memberikan pengaruh dan perubahan secara struktur fungsional, maka dalam kehidupan sosial masyarakat, kebudayaan dan adat-istiadatnya, juga berpotensi saling mempengaruhi. Sebagaimana disebutkan di bagian-bagian sebelumnya, masuknya orang Bugis dalam struktur kekuasaan juga telah menaikkan strata sosial bagi kalangan Bugis itu sendiri. Jikalau dahulunya ia seorang perantau pendatang, maka sekarang telah naik kelas menjadi orang tempatan. Maka, seluruh pengikut Opu Daeng tersebut juga menjadi orang baru Melayu.

Adaptasi sosial dan kebudayaan yang paling tampak ialah terjadi perkawinan silang antara para pem-

besar dan bangsawan Bugis dan Melayu. Peristiwa penting perkawinan antara pembesar Bugis dan Melayu ini terjadi pertama kali usai peperangan melawan Raja Kecil, ketika para pembesar Melayu dan Bugis bersepakat membicarakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua belah pihak. Ketika itu, perkawinan saling terjadi untuk empat peristiwa, yakni (1) perkawinan antara Daeng Celak dengan Tengku Mandak, yang tak lain adalah adik dari Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sendiri, (2) perkawinan Daeng Menampok dengan Tengku Tipah, yang tak lain adalah emak saudara (bibi) dari Sultan Sulaiman, (3) Daing Merewah, Yamtuan Muda (1) beristerikan Tun Cik Ayu (Anak Temenggung Riau) yang tak lain adalah janda dari Sultan Mahmud Mangkat Dijulang—yang dinikahi ketika masih sangat muda, (4) perkawinan Daeng Maketok dengan Tun Enah putri dari Marhum Mangkat di Kayu Anak, yang merupakan sepupu Sultan Sulaiman, (5) pernikahan Daeng Masuru dengan Tun Kecil yang juga keponakan Sultan Sulaiman.<sup>44</sup>Dalam teks sejarah lainnya juga diceritakan perihal perkawinan antara Daeng Parani dengan Tengku

---

<sup>44</sup>Ayu Nor Azilah dan Wayu Nor Asikin Mohamad, *Interaksi Sosial Masyarakat Johor-Riau Antara Tahun 1600 Hingga 1700 Berdasarkan Karya-Karya Historiografi Terpilih*, Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Vol. 4 No. 1 (2017).

Irang (Tengku Tengah). Daeng Menampo' berkahwin dengan Tun Tipah, adinda Sultan Sulaiman, Daeng Masuro menikahi dengan Tun Kechik dan Daeng Mengeto' berkahwin dengan Tun Aishah.<sup>45</sup> Selain itu dinyatakan juga perkahwinan Daeng Chelak atau Daeng Pali berkahwin dengan Raja Bakal. Turut disebut juga perihal perkawinan antara Raja Haji putera kepada Opu Daeng Chelak dengan Encik Aisyah, dan ketika Encik Aisyah wafat, Raja Haji kemudian dikawinkan dengan Encik Sajik, anak kepada Tengku Raja Amran.<sup>46</sup> Kawin silang dari pembesar ini telah juga berimbas pada perkawinan kebudayaan dan adat istiadat kedua belah pihak. Hal ini memperkuat posisi Bugis sebagai Melayu baru karena ikatan pernikahan ini menguatkan ikatan darah mereka. Bahkan dengan perkawinan tersebut, justru mengukuhkan kekuatan struktural Bugis di Melayu.

Kawin silang yang demikian itu tidak hanya dilakukan di kalangan pembesar bangsawan dan saudagar saja, melainkan juga pada para bawahan yang justru

---

<sup>45</sup>Abdullah Zakaria Ghazali, (2002). *Daeng Chelak Ibni Daeng Rilekkekek: Mene-lusuri Maklumat Daripada Teks Melayu*, Jurnal Seri Alam, jil.8, Universiti Ma-laya, Kuala Lumpur, hlm. 119.

<sup>46</sup>Rusphin Mohd. Asyraf Taip. (2003). *Sejarah Politik Negeri Selangor: Kajian Berdasarkan kepada Teks: Hikayat Negeri Johor* (Latihan Ilmiah), Universiti Ma-laya, Kuala Lumpur, hlm. 58.

jumlahnya bisa lebih banyak. Meski demikian, di tataran sosial masyarakat, masih terbentuk ikatan primordialisme dan kesukuan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari banyak kampung-kampung yang diberi nama berdasarkan dengan kelompok suku tersebut. Seperti halnya dengan nama Kampung Bugis di Kota Tanjungpinang dan di Daik Kabupaten Lingga. Kampung itu diberi nama demikian karena banyak warga yang bermustautin di kampung itu berasal dari atau suku Bugis. Nama yang sering juga dijumpai ialah kampung China atau Pacinan. Hal ini memperlihatkan kehidupan sosial masyarakat ketika itu sangat dinamis. Pada kesempatan tersebut, mereka masih dapat melakukan adat istiadat dari kampung halaman, namun pada kesempatan lain, yang kegiatannya memiliki skop lebih besar, mereka akan mengikuti adat istiadat Melayu.

Perkawinan silang menjadi penanda meleburkan darah keturunan. Semestinya hal ini ditenggerai sebagai sebuah peleburan identitas yang telah lepas dari pengaruh kesukumannya. Setidaknya itu dibuktikan dengan gelar “Raja” yang melekat pada setiap anak turunan dari bangsawan Bugis secara patriarki. Gelaran itu di pakai dan disandang hingga saat ini dan menjadi satu

gelaran kebangsawanan yang tidak hilang. Keberadaan gelar adat dan sosial ini juga diterapkan di daerah lain seperti di Jawa, Sulawesi, Palembang dan lain sebagainya. Bahkan, nyaris tidak ada lagi istilah Bugis yang digunakan oleh generasi penerus Opu Daeng berlima. Anak cucu mereka secara perlahan justru menanggalkan gelar-gelar kebangsawanan Bugis dan menggunakan gelar-gelar kebangsawanan Melayu. Maka, tidak heran bila kemudian terunan patriarki dari Melayu menggunakan Tengku atau Engku sedangkan untuk turunan dari Bugis menggunakan Raja pada nama depan atau gelar kebangsawannya.

Satu adat istiadat yang berubah dalam istana kerajaan ialah tentang pengukuhan atau penabalan sultan (YDB) dilakukan oleh raja muda (YDM). Perangkat yang digunakan antaranya ialah regelia dengan satu di antaranya berupa cogan, sebuah tombak besar dengan sayap menyerupai daun sirih dengan tulisan silsilah.<sup>47</sup> Terjadi polemik pada masa suksesi kepemimpinan dari Sultan Mahmud Syah ke penerusnya pada 1795. Hal itu karena ada dua orang putera sultan yang masing-ma-

---

<sup>47</sup>Lebih lengkap tentang regelia dan cogan, lihat Aswandi Syahri dan Raja Murad, *Cogan, Regelia Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pabang*, (Tanjunpinang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2016).

sing memiliki dukungan dari dua kelompok berbeda di kalangan Melayu dan Bugis. Sementara di sisi lain, Sultan pernah mewasiatkan dan menerangkan perihal calon penggantinya dan bahkan sudah mempertemukan keduanya itu. Sultan mempersiapkan Tengku Husen untuk meneruskan tahtanya. Akan tetapi, YDM Raja Jakfar ketika menginginkan Tengku Abdurrahman meneruskan tampuk kekuasaan kerajaan. Pada akhirnya, keduanya sama-sama dikukuhkan. Tengku Husen dikukuhkan oleh Bendahara Pahang dan Tengku Abdurrahman dikukuhkan oleh Raja Jakfar di Lingga. Secara adat istiadat terjadi polemik pengukuhan Tengku Abdurrahman sebab prosedur pengukuhanannya tidak menggunakan regelia, khususnya cogan yang menjadi simbol utamanya. Sejak saat itu, cogan yang telah dipakai secara turun temurun itu tidak lagi menjadi bagian utama perangkat untuk menabalkan sultan. Penabalan dilakukan dengan perangkat lain.

Yang tidak kalah menarik, sumpah dilakukan menggunakan nama besar Allah dan menggunakan pendeketan yang lebih Islami. Perubahan secara adat istiadat di lingkungan kerajaan ini juga mempengaruhi adat di istiadat di luar kerajaan, di mana Islam dijadikan

rujukan untuk setiap tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Dalam hal ini, Islam di kalangan masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai norma agama melainkan juga sebagai sumber nilai perilaku. Cendekia yang kuat dalam tradisi keintelektualannya muncul dari kalangan Bugis, seperti Raja Ahmad dan Raja Ali Haji. Yang terakhir bahkan sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran di Riau-Lingga kala itu dan menjadi rujukan untuk kajian historiografi Melayu.

Proses asimilasi dan akulturasi di antara Bugis dan Melayu ini tidak tampak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman baru terhadap Islam sebagai agama, norma dan dogma kehidupan masyarakat. Ketika keturunan bangsawan mulai menaruh minat kepada ilmu pengetahuan dan ilmu agama, maka ia kemudian memiliki pengaruh terhadap kebijakan kekuasaan. Dengan demikian, Islam justru mempengaruhi tradisi Bugis dan Melayu sekaligus sehingga praktik-praktik yang dulunya bagian dari tradisi dan adat istiadat melayu ataupun bugis dikoreksi kembali untuk disesuaikan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan pemahaman yang berkembang ketika itu. Beberapa tradisi baru pun hadir, seperti mandi safar, yak-



ni tradisi yang dipercayai sebagai bentuk tolak balak dan mempersucikan diri. Sementara tradisi maulid nabi, juga tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya karena perayaan itu sama-sama dilakukan dalam tradisi Bugis maupun Melayu. Begitu juga dengan tradisi malam tujuh likur pada bulan Ramadan yang berbentuk doa selamat bersama masyarakat kampung diiringi silaturahmi dan memasang pelita ataupun dian di masing-masing rumah. Adat istiadat itu menjadi lebih dan tidak lagi ada pembeda, mana yang menjadi adat Bugis dan mana yang menjadi adat Melayu ketika itu. Semuanya sudah dilakukan seiring dengan pemahaman bentuk dalam meninggikan nilai-nilai agama Islam. Maka cukup jelas sekali bahwa semangat dari tradisi masyarakat di Riau Lingga kala itu bernafaskan pada Islam, bukan bergantung pada karakteristik kebudayaan tertentu.

### **C. Integritas Melayu: Relevansi dari Pengalaman Riau-Lingga**

Pembincangan bagian terdahulu di bab ini telah memperlihatkan betapa kesukuan bisa melebur menjadi sebuah bentuk baru dengan semangat baru pula. Hal itu diperlihatkan bagaimana eksistensi etnis dari

luar Melayu bisa menjadi Melayu ketika masuk dalam struktur fungsional kemelayuan itu sendiri. Kehadiran Bugis di tanah Melayu awalnya hanyalah pendatang biasa saja yang hendak mengais rezeki dan mencari kehidupan lebih baik. Namun, kehadiran mereka justru menarik perhatian pihak pembesar Melayu sehingga dijadikan mitra untuk kerjasama dengan suatu kesepakatan atau kontrak. Dampak dari kontrak tersebut ialah pembagian kekuasaan antara Melayu dan Bugis sehingga membuat Bugis menjadi bagian dari aktor kekuasaan dan sekaligus sebagai aktor sejarah.

Posisi Kepulauan Riau yang menjadi daerah perlintasan perdagangan global memiliki posisi strategis untuk menjadi tujuan perdagangan, baik dari era Malaka hingga Temasik (Singapura). Dari sinilah muncul perkampungan-perkampungan baru di sekitaran Malaka sehingga nama-nama perkampungan itu masih digunakan hingga sekarang. Dari contoh perantauan Bugis di Tanah Melayu, mereka tidak hanya menyebar di kota-kota besar di Kepulauan Riau dan Semenanjung Malaya saja, melainkan juga di pulau-pulau kecil sebagai tempat persinggahan sekaligus tempat yang relatif tidak terlalu banyak pergesekan dengan masyarakat

setempat ataupun suku lainnya, seperti di Siantan (sekarang bagian dari kabupaten Anambas). Nahkoda Alang yang menjadi tujuan awal Opu Daeng berlima menetap di Siantan karena daerah tersebut relatif lebih aman dari aksi lanun-lanun serta jauh dari keramaian dan pantauan dari pihak-pihak lain. Hal seperti ini menjadi proses berharga bagi setiap suku yang datang ke tanah Melayu karena dapat mempelajari karakteristik masyarakat setempat lalu beradaptasi, berasimilasi dan kemudian berakulturasi. Sedangkan bagi masyarakat tempatan, tidak ada acaman yang dianggap terlalu signifikan, dan bahkan kehadiran mereka membantu peningkatan perekonomian.

Beragam etnis yang datang ke Riau Lingga atau daerah Kepulauan Riau saat ini — dapat diterima dengan baik karena pada dasarnya kehadiran mereka itu tidak membahayakan dan tidak juga memberikan pengaruh negatif. Sebab, umumnya perantau kelas menengah datang hendak mencari penghidupan yang lebih baik, sementara perantau kelas menengah dan atas hendak melakukan ekspansi bisnis guna memperluas jaringan serta memanfaatkan kondisi geografis kepulauan untuk meningkatkan komoditi yang menjadi permintaan pa-

sar global ketika itu. Dari hal ini terdapat simbiosis mutualisme antara pendatang dengan masyarakat tempatan.

Kehidupan yang dijalankan juga tidak mengalami bentrokan antara etnis tersebut bisa melahirkan disintegrasi sosial. Dalam sejarah disebutkan bahwa terdapat kebijakan dari penguasaan kerajaan untuk membangun perkampungan berdasarkan etnis dengan masing-masing satu perwakilan sebagai pimpinannya. Pemimpin ini juga sebagai koordinator dan perwakilan apabila ada hal-hal yang mesti didiskusikan di antara para puak kampung. Dalam sejarah tidak tercatat pernah terjadi bentrokan etnis di Riau Lingga kecuali bentrokan dengan pasukan Belanda. Terjadinya eksodus dari Tanjunpinang ke Daik pada era pemerintahan Sultan Mahmud Riayat Syah juga karena faktor sebagai siasat untuk mengelabui Belanda. Ketika itu, banyak armada kapal yang berlajar ke Daik Lingga ke arah selatan mengikuti sultan dan sebagian lainnya berpindah ke arah barat mengikuti temanggung di Bulang. Tanjunpinang, sebagaimana dikisahkan dalam *Tuhafah al-Nafis* menjadi daerah sepi dan hanya menyisakan etnis Tionghoa saja. Perkebunan dibiarkan terbengkalai dan

sebagian lainnya dilanjutkan oleh etnis Tionghoa, seperti perkebunan gambir yang kala itu menjadi komoditi paling banyak dicari oleh bangsa Eropa.

Dalam sejarah juga disebutkan perihal adanya pergolakan antara Bugis dan Melayu pada awal ketika Bugis mulai memasuki struktur kekuasaan kerajaan. Pasukan dari Pahang dan Terengganu berupaya menyerang beberapa pembesar Bugis karena merasa resah dengan dominasi Bugis dalam kekuasaan. Nyatanya, sejarah juga membuktikan bahwa upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan struktur kerajaan berjalan sebagaimana mestinya hingga masa akhir kerajaan pada 1913 M. Maka, tidak tepat juga bila ada peneliti menyebutkan bahwa, misalnya, pasukan yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabillah atau yang dikenal marhum Teluk Ketapang, tidaklah bisa dikatakan sebagai pasukan Bugis sebab ia menjalankan tugasnya sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM). Dengan demikian, ia pun tidak bisa begitu saja dibilang sebagai pimpinan Bugis karena ia telah menjadi Melayu karena perkawinan silang di antara moyangnya.

Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, bahwa puak Melayu dan Bugis telah melahirkan

suatu bentuk baru dalam tatanan politik dan sosial ketika terjadi perkawinan di antara mereka. Darah mereka juga tidak lagi murni Melayu dan juga Bugis. Namun, penanda bahwa secara patriarki mereka bernasab pada orang tua yang Melayu dan Bugis itu ditandai nama atau gelaran di depan nama, seperti “Tengku” dan “Engku” untuk keturunan Melayu dan “Raja” untuk keturunan Bugis. Gelar Raja itu juga sesuatu yang baru hadir setelah kedatangan Bugis. Dengan demikian, maka para perantau di tanah Melayu yang hadir di era kerajaan Johor-Pahang-Riau sudah menjadi Melayu seutuhnya. Walaupun kini mereka bisa menemukan nasab hingga ke bangsawan Bugis dari Opu Daeng yang Lima, namun mereka telah tumbuh dan hidup dalam tradisi dan adat istiadat Melayu. Demikian juga dengan etnis-etnis lain, mereka yang datang ketika era kerajaan dan masih memiliki turun temurun hingga saat ini, mereka telah menjadi bagian Melayu. Konteks pemahaman yang demikian ini, akan menghilangkan gap primordialisme dan sukuisme di setiap daerah. Multietnis yang ada di daerah justru harus dimaknai sebagai keberagaman yang perlu dirawat. Begitu juga multikulturalisme yang ada di daerah juga harus di

jaga dan dirawat bersama agar karena tidak apabila telah terjadi perkawinan silang, kesukuan itu tidak lagi bisa mewakili darah.

Pengalaman Indonesia modern ini perlu kiranya untuk mengambil contoh dari pengalaman yang pernah terjadi di Riau-Lingga sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Situasi politik di setiap daerah di Indonesia saat ini sering kali mengusung isu-isu primordialisme, kesukuan dan agama yang sering kali dalam bentuk bahasa “putera daerah”. Dalam hal primordialisme dan kesukuan, bahkan ada upaya kuat untuk kait-mengaitkan nasab keturunan dengan keabsahan nasab untuk disebut sebagai putera daerah. Liberalisasi politik di Indonesia justru mengantarkan pembangkitan kembali isu-isu primordialisme dan agama sebagai isu seksi. Terjadinya kekerasan selama pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah seringkali karena kuatnya isu primordialisme yang sudah di sekat-sekat sedemikian rupa untuk membangun penyempinan makna kesukuan dan kedaerahan. Dalam politik saat ini juga terjadi pergolakan, misalnya calon kepala daerah antara pulau A dan pulau B, menjadi pertengkaran karena penyempinan itu daerah yang dilakukan ma-

sing-masing tim dalam membangun fanatisme pendukungnya. Akibatnya, dinamika sosial menjadi tidak seimbang karena sistem tercemar oleh penguatan isu yang memecah belah.

Riau-Lingga yang kini disebut Kepulauan Riau tidak memiliki sejarah adanya benturan etnis dan multienis dan multikultur yang ada di daerah sepanjang sejarah. Hal ini karena perawatan yang baik oleh para aktor agar struktur dan fungsional sistem bisa berjalan dengan baik. Aktor wajib beradaptasi, menjaga integrasi dan memelihara latensinya supaya tujuan bisa tercapai dengan baik. Sehingga misalnya, dalam contoh sejarah Bugis dan Melayu di atas, isu bersama yang menjadi pokok perhatian mereka justru mempertahankan kerajaan dan kekuasaan dari rongrongan kolonialisme bangsa Eropa ketika itu. Tujuan yang lebih besar seperti itu telah menyingkirkan isu-isu sempalan yang justru bisa menimbulkan disintegrasi. Pengalaman sejarah di Johor-Pahang-Riau-Lingga ini patut menjadi acuan dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Hingga saat ini, orang Melayu pun masih sangat terbuka dengan para pendatang yang mau beradaptasi dan berasimilasi dengannya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan sebelumnya telah mengantarkan pada kongklusi untuk menjawab dua buah pertanyaan penting yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan analisis dengan metodologi yang digunakan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang kehadiran Bugis di tanah Melayu era kerajaan Johor Pahang Riau dilandasi oleh dua faktor utama, politik dan ekonomi. Dari faktor politik terjawab bahwa perantauan mereka dari daerah asal karena tidak setuju dengan kesepakatan politik yang dibuat oleh bangsawan di tanah Bugis dengan Belanda yang dikenal dengan perjanjian Bungaya. Perjanjian itu membuat sebagian besar pembesar kerajaan-kerajaan Bugis memilih bermigrasi ke daerah-daerah lain. Diaspora mereka ini tidak hanya pada satu tujuan, melainkan beberapa tujuan, seperti ke daerah di sekitar Kutai Kataranegara, ke Batavia, ke Johor Riau. Di daerah kerajaan Johor Pahang Riau ini, terdapat beberapa perantau dari kerajaan di Sulawesi Selatan seperti

Opu Daeng yang berlima, Daeng Matekko, Nahkoda Alang dan lain sebagainya. Sedangkan dari faktor ekonomi dapat diketahui bahwa mereka memasuki daerah perantauan sebagai saudagar yang datang berdagang dan menawarkan jasa pengangkutan barang. Usaha mereka ini telah sampai ke beberapa daerah di sekitar Sumatera, semenanjung Malaya, Kepulauan di Riau, bahkan juga sampai ke daerah Siam, Campa dan Kamboja. Kondisi geografis selat Malaka dan Laut China Selatan sebagai daerah lalu lalang ekspedisi global, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan Bugis untuk memilih merantau ke tanah Melayu. Bergerak dalam bidang ekonomi ini mampu mempertahankan mereka dari kebutuhan ekonominya. Sedangkan orang Bugis sendiri terkenal memiliki etos kerja dengan beberapa keahlian. Misalnya, mereka yang hidup di daerah asalnya di tepi pantai, memiliki kemampuan membuat kapal yang bagus, sementara mereka yang hidup di pedalaman memiliki kemampuan bercocok tanam yang baik. Sehingga, ketika mereka melakukan perantauan—karena faktor politik tadi—mereka

bisa saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka sangat wajar sekali apabila mereka bisa beradaptasi dan berasimilasi.

2. Kehadiran Bugis di tanah Melayu telah memberikan dampak besar secara struktur fungsional. Adanya pembagian kekuasaan dalam struktur kerajaan serta sumpah setia Bugis dengan Melayu telah menjadi titik kisar sejarah baru kerajaan Melayu. Dalam perspektif struktural fungsional, sumpah setia itu tak lain adalah upaya adaptasi yang dilakukan oleh Bugis di Tanah Melayu guna mencapai tujuannya. Bahkan, integrasi dan latensi yang diperlihatkan oleh Bugis dalam pengaruhnya semakin memperkuat tentang sebuah prosesnya untuk menjadi Melayu seutuhnya. Ia tidak hanya sekadar menjadi aktor dengan kekuatan struktural saja, melainkan juga memiliki kekuatan fungsional sekaligus. Hal inilah membuat Bugis dapat diterima di Tanah Melayu sehingga terjadi proses asimilasi dan akulturasi yang mampu melahirkan fenomena sosial dan kebudayaan baru.

Dalam hal sosial, perkawinan yang terjadi di antara pembesar Bugis dan Melayu justru menguatkan fu-

ngsi pada sistem sosial untuk meredam pergolakan dan pertentangan berdasarkan sukuisme. Perkawinan silang menjadi penanda meleburkan darah keturunan dan peleburan identitas yang telah lepas dari pengaruh kesukuannya. Setidaknya itu dibuktikan dengan gelar “Raja” yang melekat pada setiap anak turunan dari bangsawan Bugis secara patriarki. Gelar itu dipakai dan disandang hingga saat ini dan menjadi satu gelaran kebangsawanan yang tidak hilang. Keberadaan gelar adat dan sosial ini juga diterapkan di daerah lain seperti di Jawa, Sulawesi, Palembang dan lain sebagainya. Bahkan, nyaris tidak ada lagi istilah Bugis yang digunakan oleh generasi penerus Opu Daeng berlima. Anak cucu mereka secara perlahan justru menanggalkan gelar-gelar kebangsawanan Bugis dan menggunakan gelar-gelar kebangsawanan Melayu. Maka, tidak heran bila kemudian turunan patriarki dari Melayu menggunakan Tengku atau Engku sedangkan untuk turunan dari Bugis menggunakan Raja pada nama depan atau gelar kebangsawannya.

## **B. Saran**

Penelitian ini memang bukan yang pertama dalam kajian sejarah kerajaan di Kepulauan Riau. Namun

penelitian ini dan penelitian sebelumnya terlihat bahwa ada banyak bagian yang perlu mendapatkan perhatian dari peneliti sejarah dan sejawaran lainnya. Hal ini tidak lepas dari luasnya bentangan sejarah serta banyak sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk merekonstruksi masa lalu menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Penelitian berdasarkan periodisasi akan memperkaya khazanah pengetahuan tentang masa lalu berdasarkan kroniknya. Oleh sebab itu, beranjak dari penelitian ini juga, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian dengan pendekatan sosial yang lebih banyak untuk sejarah di Kepulauan Riau. Pendekatan sosial dengan beragam teori sosial sebagai ilmu bantunya diyakini akan mampu memberikan kontribusi positif dalam penulisan historigrafi Melayu. Dari penelitian ini juga terlihat bahwa banyak fragmen sejarah yang patut dikaji lebih mendalam menggunakan pendekatan antropologi, linguistik dan bahkan dari perspektif studi Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Absa, A Rasyid, *Susur Galur Melayu Bugis*, makalah.
- Adil, Haji Buyong, *Sejarah Johor*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, 1980.
- Ali, Raja (Haji), *Silsilah Melayu Bugis*, (Tanjungpinang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2007.
- Ali, Raja (Haji), *Tuhfah an-Nafis*, dalam Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, terj. Ahmad Fauzi Basri, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Ali, Raja (Kelana), *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, Singapura: Al-Imam, 1328 H.
- Andaya, Leonard Y., *Diaspora Bugis, Identitas dan Islam di Negeri Malaya*, dalam *Diaspora Bugis Di Alam Melayu*, Makassar: Innawa, 2010.
- Azilah, Ayu Nor dan Wayu Nor Asikin Mohamad, *Interaksi Sosial Masyarakat Johor-Riau Antara Tahun 1600 Hingga 1700 Berdasarkan Karya-Karya Historiografi Terpilih*, Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Vol. 4 No. 1 (2017).
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.
- Erman, Erwiza (ed.), *Sejarah Kesultanan Riau-Lingga Dalam Perspektif Hukum dan Budaya*, Jakarta, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Ghazali, Abdullah Zakaria, 'Daeng Chelak Ibni Daeng Rilkek: Menelusuri Maklumat Daripada Teks Melayu', Jurnal Seri Alam, Jil.8, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2002.
- Hall, D.G.E, *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.



- Hamid, Wahyuddin, *Pasoppe Bugis Makassar II*, Jakarta: Telaga Zaman, 2005.
- Hooker, Virginia Matheson, *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam* (Ahmad Fauzi Basri, penerjemah), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Ishak, Hikmat, *Warisan Riau: Tanah Melayu Indonesia yang Legendaris*, (2001), Yayasan Warisan Riau, Pekanbaru.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kusumah, Andi Ine, *Migrasi dan Orang Bugis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.
- Lubis, Nabilah, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2001.
- Malik, Abdul, dkk., *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah*, Lingga: Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri, 2012.
- Omar, Arifin, *Bangsa Melayu: Konsep Bangsa Melayu dalam Demokrasi dan Komuniti 1945-1950*, Selangor: SIRDC, 2015.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta Paris, 2006.
- Pursell, Victor *Orang-orang Cina di Tanah Melayu*, terjemah Nik Hasna Nik Mahmood, Johor: Universiti Teknologi Malaya, 1997.
- Putten, Jan Van der, dan Al Azhar, *Di dalam Berkenalan Persahabatan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Rahman, Abd., *Konsep Mamlakah dan Keharusan Mashlahah dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana*, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Ritzer, Goerge dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimanda, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Samad, Raja Syofyan, *Negara dan Masyarakat: Studi Penerrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sjamsuddin, Helius, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Sofyan, Faisal, *Sejarah Persemendaan Melayu dan Bugis*, Tanjungpinang: Milaz Grafika, 2014.
- Surbakti, Ramlah, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gra-sindo, 1993.
- Suryani, Elis NS, *Filologi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Syahri, Asywandi dan Raja Murad, *Cogan: Regalia Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang*, (2006), Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau.
- Taip, Rusphih Mohd. Asyraf., *Sejarah Politik Negeri Selangor: Kajian Berdasarkan kepada Teks: Hikayat Negeri Johor (Latihan Ilmiah)*, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2003.
- Turner , H. dan Alexander Maryanski, *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yacob, M. Amin, *Sejarah kerajaan Lingga: Johor-Pahang-Riau-Lingga*, Pekanbaru: Unri Press, 2004.
- Yunus, Hamzah, *Alihaksara Naskah-Naskah Kuno Riau*, Penyengat: Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu Riau Pulau Penyengat dan Yayasan Sosial Chevron dan Texaco Indonesia, 2001.

## GLOSARIUM

Adaptasi	penyesuaian terhadap lingkungan.
Adat	cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.
Adopsi	penerimaan usul atau ide atau kebiasaan dari luar.
Akomodatif	bersifat dapat menyesuaikan diri.
Aktor	orang yang berperan dalam suatu kejadian penting.
Akulturas	percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.
Analisis	penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Antropologi	ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau
Armada	rombongan (pasukan) kapal perang atau kapal-kapal dagang.
Asimilasi	penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.
Askar	laskar atau tentara.
Astronomi	ilmu tentang matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya; ilmu falak.
Babak	bagian dari suatu keseluruhan proses, kejadian atau peristiwa.
Bangsawan	keturunan orang mulia (terutama raja dan kerabatnya).

Bermustautin	tinggal menetap selamanya di suatu daerah.
Bugis	Suku asli masyarakat Sulawesi.
Cogan	Panji-panji sebagai tanda; lencana yang mengandung semboyan berupa sebuah tombak besar dengan sayap menyerupai daun sirih dengan tulisan silsilah
Daeng	gelar bangsawan Bugis.
Datok Bendahara	orang kepercayaan sultan yang bertugas sebagai menteri utama yang memberikan penasihat sultan dalam bidang pentadbiran. Ia juga menjadi ketua hakim dan angkatan perang di darat serta sebagai pelaksana tugas sultan ketika sultan sedang sakit atau berada dalam perjalanan ke luar negeri.
Diaspora	masa tercerai-berainya suatu bangsa ke berbagai penjuru dunia.
Dikotomi	pembagian atas dua kelompok yang saling betentangan.
Dinamika	gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.
Dinamis	penyuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya.
Disintegrasi	keadaan tidak bersatu padu; keadaan berpecah belah; hilangnya keutuhan dan persatuan.
Dominasi	penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (da-

	lam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan dsb).
Eksodus	perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran
Ekspansi	perluasan wilayah satu negara dengan menduduki (sebagian atau seluruhnya) wilayah negara lain.
Ekspedisi	perjalanan penyelidikan ilmiah di suatu daerah yang kurang dikenal; pengiriman tentara untuk memera- ngi (menyerang, menakukkan) musuh di suatu daerah yang jauh letaknya.
Eksplanasi	penjelasan peristiwa sejarah yang dilakukan peneliti dalam menulis sejarah untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa dan mengapa.
Eksplorasi	penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan) terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu.
Ekspose	pengungkapan atau penyingkapan secara formal tentang suatu kenyataan.
Encik	gelar bagi keturunan bangsawan yang tidak berasal dari keluarga raja
Engku	gelar bagi keturunan sultan yang tidak atau belum menduduki posisi raja/sultan.
Etnis	berkaitan dengan kelompok sosial di sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan ter-

	tentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dsb.
Fase	tingkatan masa (perubahan, perkembangan dsb).
Filologi	ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana yang terdapat dalam bahan-bahan tertulis.
Fragmen	cuplikan atau petikan (sebuah cerita, lakon, dsb).
Fungsionalisme	teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi satu kesatuan yang berfungsi.
Gap	jurang pemisah.
Generasi	sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya; masyarakat yang sezaman yang sama memiliki (merasakan) pengalaman sejarah yang bersifat mendasar pada usia formatif.
Gerilya	cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang (biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba)
Hegemoni	pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dsb suatu negara atas negara lain (atau negara bagian).
Heroik	bersifat pahlawan.
Heuristik	sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untukn mendapatkan data-data, atau materi sejarah.
Historiografi	tahapan akhir dalam prosedur penelitian sejarah yang mencakup penap-

	siran, penjelasan dan penyajian sejarah.
Imperialis	bangsa (negara) yang menjalankan politik menjajah bangsa (negara) lain; neraga yang memperluas daerah jajahannya untuk kepentingan industri dan modal.
Imperium	kerajaan; kekaisaran.
Implementasi	pelaksanaan; penerapan.
Inspektorat	badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan
Integrasi	pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat; penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional.
Integritas	sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.
Interpretasi	pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; penafsiran sejarah.
Intervensi	campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dsb).
Khazanah Klasik	barang milik; harta-benda; kekayaan mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi; zaman kuno.
Kolaborasi	perbuatan kerjasama dengan orang (pihak) lain.

Kolonialisme	paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.
Komprehensif	luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi).
Konflik	percekcokan; perselisihan; pertentangan.
Konglomerat	pengusaha besar yang mempunyai banyak perusahaan atau anak perusahaan.
Kontribusi	sumbangan; bantuan.
Korelasi	hubungan timbal balik atau sebab akibat.
Kritik sejarah	suatu analisis atas isi dokumen atau sumber sejarah untuk dapat membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil.
Kronik	catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu.
Kultural	berhubungan dengan kebudayaan.
Laksamana	orang kepercayaan sultan yang bertugas sebagai penjaga keamanan lautserta menjadi duta bagi sultan untuk urusan luar negeri.
Laten	tersembunyi; terpendam; tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul).
Legitimasi	keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau



	sesuai dengan undang-undang); pengesahan.
Masyhur	terkenal.
Migrasi	perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dsb) ke tempat (negara dsb) lain untuk menetap
Modifikasi	pengubahan; perubahan.
Monarki	bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja; sistem pemerintahan yang dipimpin berdasarkan keturunan.
Monopoli	situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) lebih banyak (sekurang-kurangnya sepertiganya) dikuasai oleh satu orang atau kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.
Musafir	orang yang bepergian jauh.
Museum	gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno.
Navigasi	ilmu tentang cara menjalankan kapal laut atau kapal terbang; pelayaran, penerbangan.
Nilai	harga; mutu; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.
Norma	aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai.

Nusantara	sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
Otonomi	pemerintahan sendiri.
Patriarki	sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis keturunan bapak.
Patriotisme	sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air.
Penghulu	disebut juga penghulu bendahari adalah orang kepercayaan sultan yang bertugas mengurus sumber pemasukan dan pengeluaran negara, yakni berhubungan dengan pajak, upeti, pajak pelabuhan. Posisi yang melekat padanya ialah ketua bagi semua bendahari, ketua urusetia istana dan ketua semua syahbandar. Karena itu penghulu disebut juga penghulu bendahari.
Periodeisasi	kurun waktu.
Perspektif	cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata; sudut pandang; pandangan.
Polemik	perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka di media masa.
Primadona	yang paling utama, penting dsb di lingkungannya.
Primordialisme	perasaan kesukuan yang berlebihan.
Realitas	kenyataan.
Relasi	hubungan; perhubungan; pertalian.
Relevansi	hubungan; kaitan.

reparasi	perbaiki atas kerusakan ; perbaikan
Semenajung	bagian daratan yang menjorok ke laut; jazirah; kawasan.
Sirkulasi	peredaran.
Skema	bagan; rangka; kerangka.
Solidaritas	sifat atau perasaan senasib sepenanggungan.
sompe'	orang-orang yang sangat mengenal laut dan memiliki semangat berlayar
Sosiologi	ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.
Spirit	semangat.
Struktur	cara sesuatu dibangun atau disusun; susunan; yang disusun dengan pola tertentu.
Suksesi	penggantian (terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara) karena pewarisan; proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sukuisme	paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri.
Sultan	raja; kepala nrgara.
Sumpah	pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dsb).
Syah	raja; baginda raja.
Takluk	mengaku kalah dan mengakui kekuasaan pihak yang dianggap menang.

Tampuk	pucuk (dalam arti yang tertinggi).
Temenggung	orang kepercayaan sultan yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri dan penegak peraturan perundang-undangan. Jabatan yang melekat padanya ialah sebagai ketua polisi, ketua protokoler istana, dan bertugas juga sebagai hakim di darat
Tradisi	adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.

## DAFTAR INDEKS

<b>A</b>		Datok Bendahara	27, 116
Adaptasi	10, 83, 89, 115	Diaspora	81, 105, 111, 116
Adat	5, 86, 96, 115	Dikotomi	116
Adopsi	115	Dinamika	2, 9, 31, 116
Akomodatif	115	Dinamis	116
Aktor	103, 115	Disintegrasi	116
Akulturas	115	Dominasi	116
Analisis	115		
Antropologi	115	<b>E</b>	
Armada	115	Eksodus	117
Asimilasi	115	Ekspansi	117
Askar	28, 115	Ekspedisi	117
Astronomi	115	Eksplanasi	117
		Eksplorasi	117
		Ekspose	117
<b>B</b>		Encik	91, 117
Babak	115	Engku	78, 93, 101, 108, 117
Bangsawan	49, 115, 128	Etnis	117
Bermustautin	116		
Bugis	1, 2, 3, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 103, 105, 107, 111, 112, 113, 116	<b>F</b>	
		Fase	118
		Filologi	16, 113, 118
		Fragmen	118
		Fungsionalisme	10, 113, 118
<b>C</b>		<b>G</b>	
Cogan	93, 113, 116	Gap	118
		Generasi	118
		Gerilya	118
<b>D</b>		<b>H</b>	
Daeng	41, 44, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 77, 78, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 98, 101, 106, 108, 111, 116	Hegemoni	118
		Heroik	118
		Historiografi	39, 118

**I**

Imperialis	119
Imperium	119
Implementasi	119
Inspektorat	119
Integrasi	11, 14, 119
Integritas	96, 119, 128
Interpretasi	119
Intervensi	119

**K**

Khazanah	5, 111, 119
Klasik	119
Kolaborasi	68, 85, 119
Kolonialisme	120
Komprehensif	120
Konflik	120
Konglomerat	120
Kontribusi	120
Korelasi	120
Kritik sejarah	120
Kronik	120
Kultural	120

**L**

Laksamana	76, 77, 120
Laten	120
Legitimasi	120

**M**

Masyhur	121
Migrasi	41, 112, 121
Modifikasi	121
Monarki	121
Monopoli	121
Musafir	121
Museum	121

**N**

Navigasi	121
Nilai	13, 121
Norma	121
Nusantara	23, 27, 28, 35, 39, 45, 49, 50, 60, 122

**O**

Otonomi	122
---------	-----

**P**

Patriarki	122
Patriotisme	122
Penghulu	76, 122
Periodeisasi	122
Perspektif	5, 111, 122
Polemik	27, 122
Primadona	122
Primordialisme	122

**R**

Realitas	17, 122
Relasi	122
Relevansi	96, 122, 128
reparasi	47, 123

**S**

Semenajung	23, 123
Sirkulasi	123
Skema	123
Solidaritas	123
sompe	46, 123
Sosiologi	8, 10, 12, 14, 72, 111, 113, 123
Spirit	123
Struktur	72, 76, 82, 123, 128

Sukses	123
Sukuisme	123
Sultan	15, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 90, 93, 111, 112, 123
Sumpah	61, 66, 67, 79, 123, 128
Syah	25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 78, 79, 93, 99, 112, 123

## T

Takluk	123
Tampuk	124
Temenggung	76, 90, 124
Tradisi	124



**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS**  
Jalan Lintas Barat Km. 19  
Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Kabupaten Bintan  
Kepulauan Riau

ISBN 978-623-91002-6-1

